



RENCANA KERJA TAHUNAN 2019



TIM PENYUSUN

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

PELINDUNG

Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA
(Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

Pengarah

- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Penanggung Jawab

Ir. Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, M.Si
(Kepala Bagian Rencana dan Laporan)

Editor

Dr. Aldi Martino Hutagalung, ST., MT
(Kepala Sub Bagian Penyiapan Rencana dan Program)

Tim Penyusun

Mirza Aditya, Gofar, Sarah Alsa, Tri Sudharma, Dieta Patik, Mochamad Imron, Koesnobroto, Wahyunengsih, Suciati, Alfin Mohammad Hafid, Fajrin Maulana, Rohadi, Tafaqquh Fiddin, Yusuf H. Habibie, Hernawan Novianto, Nadia Laila, Dian, Wahyu, Nurbaya, Tisha

COMPANY NAME

SAMBUTAN OLEH DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



Berdasarkan plat form pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Selaras dengan tahapan pembangunan dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan tahap ke-III diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Peran serta sub sektor migas dalam mencapai daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dimana sub sektor migas merupakan penghasil devisa maupun sumber penerimaan negara. Diharapkan penerimaan Negara dari sub sektor migas dapat mencapai Rp. 234,73 Triliun rupiah di tahun 2019.

Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2019 yang dijabarkan dalam program penyediaan dan pengelolaan minyak dan gas bumi yang memiliki 6 sasaran dan 15 Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja Ditjen Migas dalam pencapaian target.

Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yaitu:

1. Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional yang Ditawarkan;
2. Wilayah Kerja (WK) Non Konvensional yang Ditawarkan;
3. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan;
4. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani;
5. Layanan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak *Grass Root* dan *Refinery Development Master Plan (RDMP)*;
6. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
7. Reviu Dokumen FEED-DEDC Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak terkait untuk dapat bersatu padu mengembangkan sub sektor minyak dan gas bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah-kaidah keteknikan

DR. IR. DJOKO SISWANTO, MBA



RENCANA KERJA 2019

DAFTAR ISI

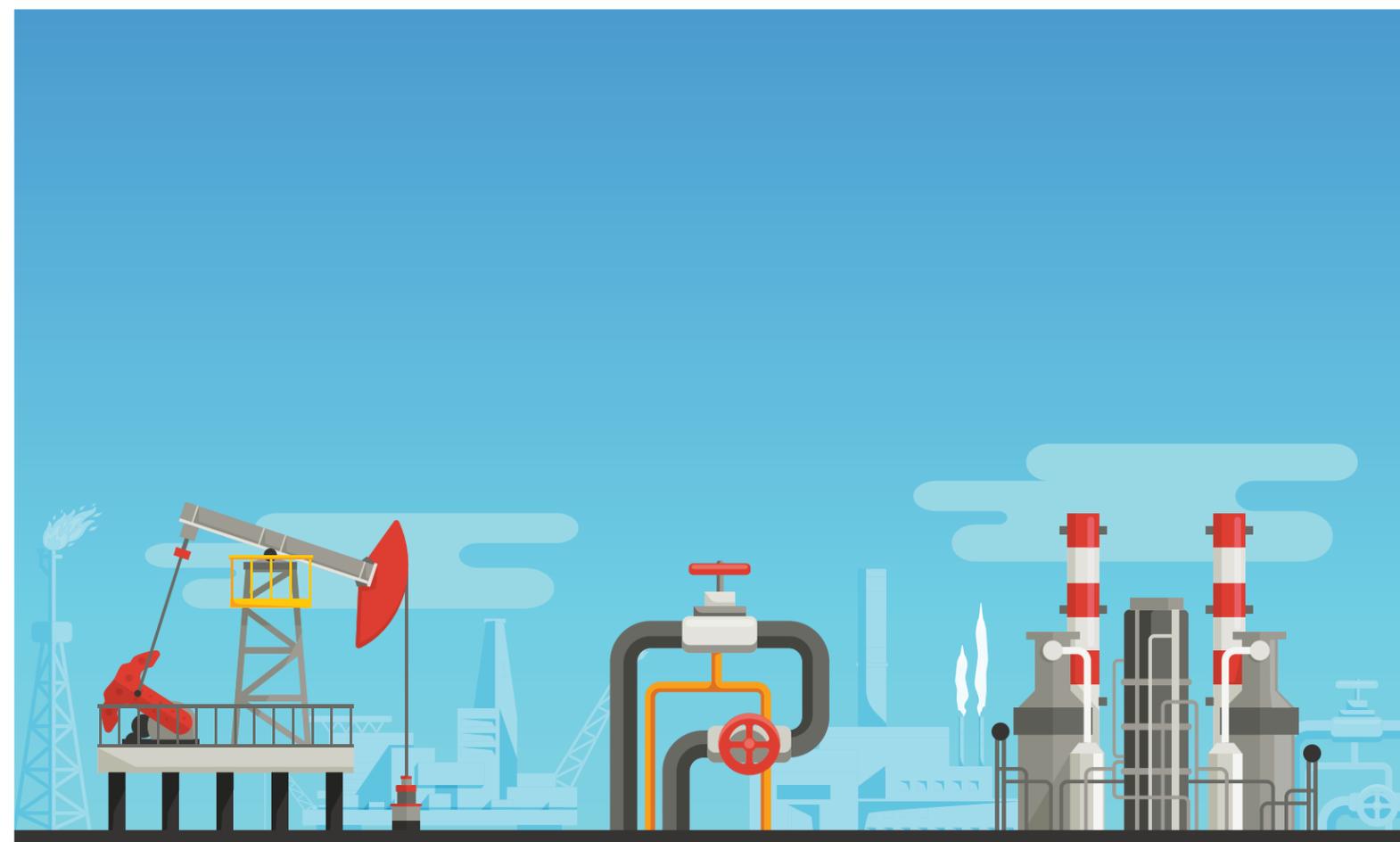
TIM PENYUSUN	2
SAMBUTAN	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR GRAFIK	7
Bab 1 Pendahuluan	8
Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional	9
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	9
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	10
Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Migas	12
Bab 2 Evaluasi Kegiatan 2014-2018	15
Lifting Minyak Dan Gas Bumi	16
Jumlah Penawaran Kontrak Kerja Sama Atau Wk Minyak Dan Gas Bumi	17
Cadangan Minyak dan Gas Bumi	25
Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri	27
Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	29
Volume Bahan Bakar Bersubsidi	36
Jumlah Realisasi Penerimaan Negara dari Subsektor Minyak dan Gas Bumi terhadap Target APBN	37
Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi	38
Jumlah Perusahaan Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja (<i>Zero Accident</i>) dan Kegagalan Operasi (<i>Unplanned Shutdown</i>) Fatal	39
Bab 3 Rencana Kerja Tahunan 2019	41
Indikator Utama (IKU) Ditjen Migas	42
Lifting Minyak dan Gas Bumi	44
Jumlah Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	45
Cadangan Minyak dan Gas Bumi	49
Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri	51
Volume BBM Bersubsidi	52
Kapasitas Kilang BBM	52
Kapasitas Kilang LPG	55
Volume LPG Bersubsidi	56
Pembangunan Infrastruktur Migas	56
Jumlah Realisasi Penerimaan Negara dari Subsektor Minyak dan Gas Bumi terhadap Target APBN	58
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Subsektor Minyak Dan Gas Bumi Sesuai Program Legislasi Nasional	59
Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi	60
Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Keteknikan dengan Baik	61
Jumlah Perusahaan Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja (<i>Zero Accident</i>) dan Kegagalan Operasi (<i>Unplanned Shutdown</i>) Fatal	61
Bab 4 Anggaran Ditjen Migas Tahun 2019	63
Bab 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	67
Anggaran Ditjen Migas Tahun 2019	68
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen Migas	68
IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hilir	70
IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	72
IKK Direktorat Teknik dan Lingkungan	74
\IKK Sekretariat Direktorat Jenderal	76
IKK Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur	77
Bab 6 Rencana Aksi	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJMN 2005-2025	10
Gambar 2. Tema pembangunan RKP tahun 2015-2018	11
Gambar 3. Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2009-2016	30
Gambar 4. Sebaran Wilayah Kerja Available dan Terminasi, serta Cekungan Gas Metana Batubara dan Shale Hydrocarbon Indonesia	47
Gambar 5. Contoh buku, leaflet dan VCD Promosi	48
Gambar 6. Alur Proses E-Lelang Blok Migas	48
Gambar 7. Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2017)	49
Gambar 8. Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2017)	50
Gambar 9. Perhitungan Konversi Bahan Bakar Bensin ke LPG untuk Nelayan	57
Gambar 10. Pembangunan FSRU Banten oleh Pihak Swasta	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Lifting Minyak Bumi Tahun 2013-2017	12
Grafik 2. Lifting Gas Bumi Tahun 2013-2017	13
Grafik 3. Statistik WK Migas Konvensional 2012-2018	13
Grafik 4. Jumlah Kegiatan Studi Bersama, Penawaran WK, dan Tandatanganan KKS	20
Grafik 5. Cadangan Minyak Bumi Indonesia	22
Grafik 6. Target dan Realisasi Cadangan Minyak Bumi	22
Grafik 7. Cadangan Gas Bumi Indonesia	23
Grafik 8. Target dan Realisasi Cadangan Gas Bumi Indonesia	23
Grafik 9. Persentase Alokasi Gas Bumi Domestik	25
Grafik 10. Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2018	25
Grafik 11. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2009-2017	27
Grafik 12. Realisasi Konkit untuk Nelayan 2016-2018	29
Grafik 13. Realisasi Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg 2007-2018	31
Grafik 14. Volume dan Realisasi BBM Subsidi	32
Grafik 15. Volume dan Realisasi LPG Bersubsidi 2014-2018	33
Grafik 16. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Sektor Migas 2014-2018	34
Grafik 17. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2014 – 2018	34
Grafik 18. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	35
Grafik 19. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas	36
Grafik 20. Prognosa Investasi Subsektor Migas Tahun 2019	58
Grafik 21. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018	64
Grafik 22. Realisasi Anggaran Ditjen Migas	65
Grafik 23. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018	65
Grafik 24. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018	66



BAB 1 PENDAHULUAN



TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Tujuan pembangunan nasional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lebih rinci lagi, akan tampak amanah yang diberikan Negara kepada para pemegang kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 didalamnya mengamankan sistem perencanaan yang mampu :

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Termasuk didalamnya tertuang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan dasar perencanaan pembangunan NKRI bahwa :

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dan
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

Berdasarkan RPJPN 2005-2025 bahwa tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus memperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan. Sedangkan visi pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah terwujudnya kemampuan bangsa dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeadilan; untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. RPJPN 2005-2025 dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMN. RPJMN Tahap I (2004-2009) dan tahap II (2010-2014) telah ditetapkan dan dilaksanakan, RPJMN Tahap III (2015-2019) sedang dilaksanakan saat ini. Sedangkan RPJMN Tahap IV (2020-2025) akan disusun sesuai dengan visi-misi program prioritas Presiden terpilih (2020-2025). Berikut rumusan arahan prioritas kebijakan RPJPN 2005-2025.



Gambar 1. Arahan Prioritas Kebijakan RPJMN 2005-2025

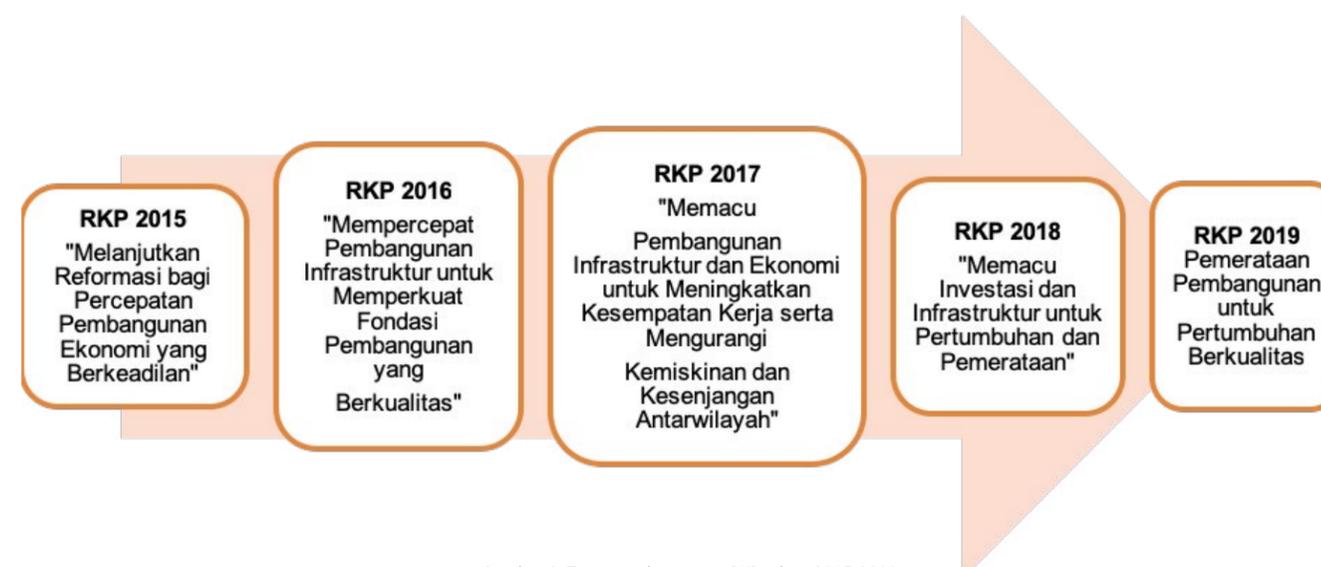
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 dengan visi pembangunan: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden Joko Widodo memuat sasaran pokok pembangunan nasional beserta kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengusung agenda tersebut dengan nama "Nawa Cita" sebagai sembilan prioritas pembangunan nasional. Nawa Cita dimulai dari

visi Presiden tentang kedaulatan bangsa di sektor politik, ekonomi, dan budaya, yang berasal dari penilaian bahwa bangsa menghadapi tiga masalah, yaitu:

1. Ketidakmampuan untuk memastikan keselamatan semua warga negara
2. Kemiskinan, kesenjangan, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta
3. Intoleransi dan krisis karakter nasional

Salah satu dari 9 Program Nawacita yang mendukung di sektor energi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Nawacita ke-7). Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah tersebut, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional pada level Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden tersebut yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL).

Sejalan dengan itu, pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa RPJM dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang



Gambar 2. Tema pembangunan RKP tahun 2015-2018

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RKP 2019 bertemakan "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2019 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Sehingga program-program pembangunan akan

ditujukan sesuai dengan tema pembangunan tersebut. Di tingkat Eselon I, untuk menjelaskan program yang tertera pada Renstra-KL diperlukan dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 yang merupakan penjabaran tahun kelima sejak tahun 2015 dengan mempertimbangkan Nawacita, Dekrit Presiden dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2010-2014. RKT ini memuat narasi dan sasaran (uraian, indikator kinerja dan target) yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan.

memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan ABPN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Tema RKP dari tahun 2015 sampai dengan 2019 telah ditetapkan sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (impact, outcome, dan output). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (impact, outcome, dan output). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU yang berlaku sampai dengan saat ini adalah berdasarkan Permen ESDM No. 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM. Dalam Permen tersebut KESDM memiliki 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 29 Sub Indikator. Jumlah IKU tersebut lebih banyak dibandingkan dengan Kementerian lain seperti Kementerian PAN dan RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perhubungan yang jumlahnya dari 6 sampai 21 Indikator. IKU Direktorat Jenderal Migas berjumlah

15 Indikator Kinerja Utama yang terbagi berdasarkan sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pencapaian kinerja di Direktorat Jenderal Migas di Tahun 2019.

Salah satu tantangan pencapaian pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana tertera pada RPJMN adalah ketersediaan infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik. Infrastruktur memainkan peran yang sangat vital bagi pembangunan di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan banyak sasaran strategis pemerintah belum tercapai. Terbatasnya infrastruktur juga turut memberi pengaruh terhadap daya tarik investasi. Tahun 2018, World Economic Forum (WEF) memuat laporan tentang tingkat daya saing negara-negara di dunia (Global Competitiveness Index) untuk tahun 2018. Dari data tersebut Indonesia berada pada posisi 45 dengan skor 64.9 dari 140 Negara. Posisi tersebut memiliki peringkat yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun s ebelumnya dengan peringkat 47 dari 135 negara. Di level Asia Tenggara Indonesia unggul dari Filipina (56). Namun demikian, indeks daya saing Indonesia kalah dibandingkan Malaysia (25) dan Thailand (38). Tahun 2018 secara umum 12 pilar yang menjadi penilaian mengalami kenaikan peringkat dan ini menjadi salah satu prestasi Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan global terhadap makroekonomi Indonesia. Dalam kaitannya terhadap infrastruktur, peringkat daya saing global Indonesia belum menunjukkan perubahan signifikan. Di tahun 2017 ini yang semula pada peringkat 52 menurun menjadi peringkat 71 dalam hal kualitas infrastruktur.

Sehingga salah satu indikator yang perlu terus mendapat perhatian adalah pada kualitas infrastruktur. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan negara-negara di kawasan regional di seluruh infrastruktur. Berdasarkan fakta tersebut, maka Indonesia perlu pengembangan logistik yang lebih optimal. Secara ringkas, kondisi infrastruktur migas Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara ditunjukkan pada Gambar 3.

Pembangunan infrastruktur yang belum optimal di tanah air tak terlepas dari alokasi dan keterbatasan dana dalam APBN. Hampir setiap tahun, porsi besar APBN dilokasikan untuk sektor-sektor yang sebenarnya bersifat konsumtif, misalnya subsidi energi. Sayangnya, sebagian subsidi energi tersebut justru salah sasaran. Padahal porsi untuk sektor-sektor konsumtif itu bisa dialihkan untuk sektor-sektor yang bersifat produktif



Grafik 3. Indeks Persaingan Global Indonesia dalam Infrastruktur



Gambar 4. Peta Rencana Infrastruktur Migas Nasional 2016-2030

Salah satunya adalah infrastruktur, dalam konteks ini adalah infrastruktur migas. Program infrastruktur migas yang termuat dalam RKP 2019 seperti terlihat pada Tabel 2 berikut.

negeri. Dengan strategi kebijakan dan perencanaan energi, investor asing dan domestik diharapkan dapat menanamkan modalnya di bisnis minyak dan gas bumi Indonesia. Untuk

Kegiatan Infrastruktur	Output	Pagu
Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	78.216 SR	852,48
Konversi BBM Ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	13.305 paket	111,27
Riviu Dokumen FEED-DEDC dan UKL-UPL Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	15 Lokasi	1,58
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	1.000 paket	8,12
TOTAL Anggaran Infrastruktur		973,45

Tabel 1. Program Infrastruktur Migas dalam RKP 2019

Selain pembangunan infrastruktur, program prioritas pemantapan ketahanan energi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, antara lain :

1. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya
2. Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri Tata Kelola Gas

Sedangkan proyek prioritas Ditjen Migas adalah

1. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi
2. Peningkatan Daya Tarik Investasi Migas
3. Penawaran WK Migas Konvensional dan Non Konvensional
4. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Eksplorasi Migas Non Konvensional
5. Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga
6. Konversi BBM ke BBG
7. Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan)
8. Penyediaan Alokasi Gas Domestik

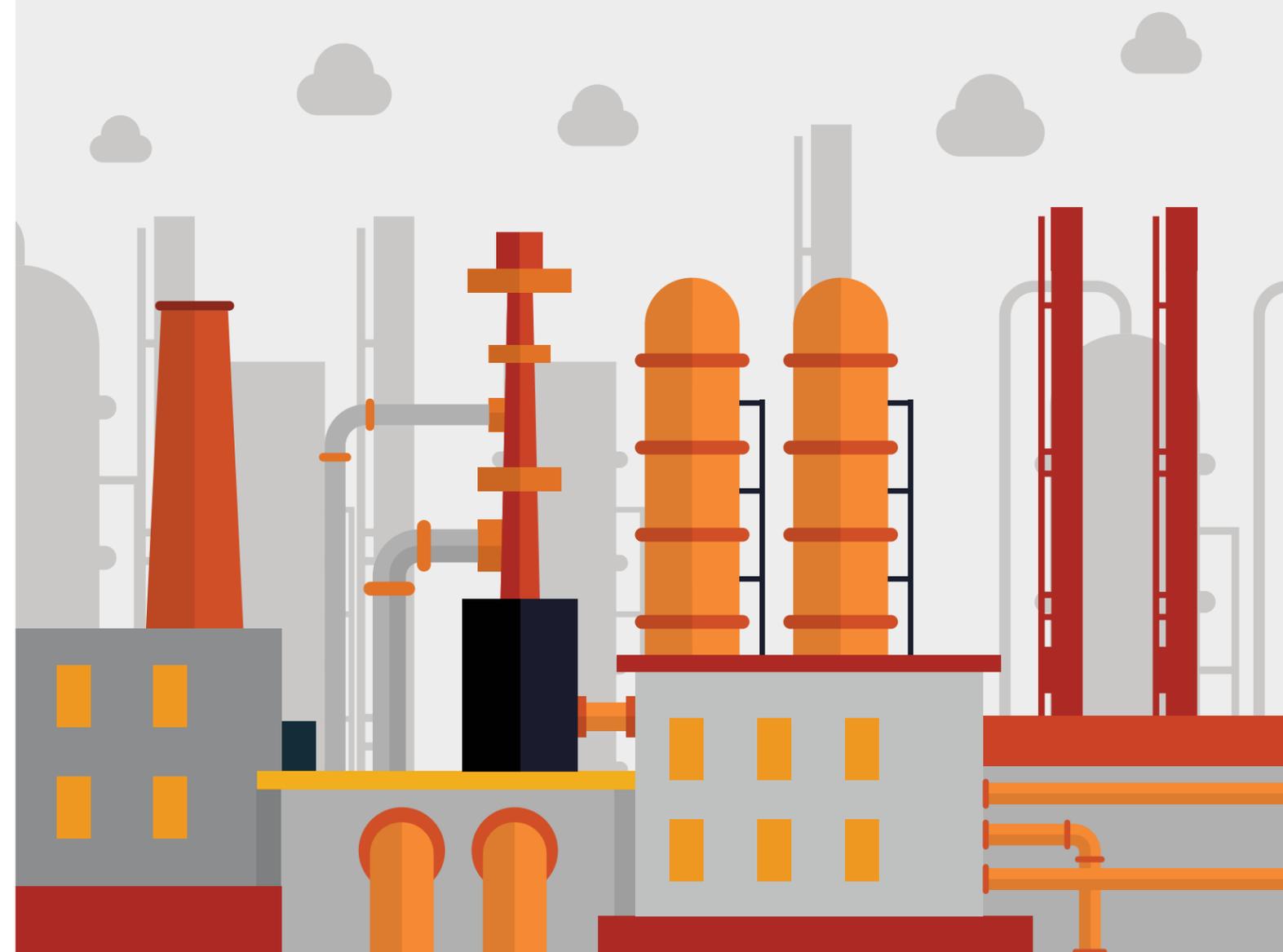
Seluruh program ini dilaksanakan dengan tujuan agar peranan penting sub sektor migas sebagai penerimaan negara, memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik, memenuhi bahan baku industri serta menciptakan efek berantai, dapat terus terjaga serta dapat menunjang semangat Nawa Cita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di sub sektor minyak dan gas bumi untuk menjaga pasokan energi dalam

menjaga nilai investasi agar terus terjaga, diperlukan adanya upaya peningkatan investasi minyak dan gas bumi nasional. Beberapa strategi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM guna menggairahkan investasi dalam industri minyak dan gas bumi nasional adalah

1. Kemudahan perijinan dan non-perijinan
2. Perubahan strategi penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi
3. Kebijakan fiskal kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
4. Perbaikan mekanisme pengelolaan dan pengawasan data & informasi perusahaan kegiatan usaha sub sektor minyak dan gas bumi
5. Penyesuaian kebijakan harga gas untuk industri tertentu
6. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan investasi minyak dan gas bumi
7. Pelaksanaan kerja sama sub sektor minyak dan gas bumi

Keseluruhan program yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran aktif seluruh stakeholder di lingkungan sub sektor migas. Dengan sumber daya alam yang kita miliki, disertai dukungan Peraturan Pemerintah yang jelas dan stabil, izin investasi yang cepat, tidak berbelit dan penegakan hukum, serta pasar yang jelas, diharapkan investasi dari luar negeri akan datang, selanjutnya para investor tersebut dapat terus mengembangkan usahanya di Indonesia.

BAB 2 EVALUASI KEGIATAN 2014-2018



LIFTING MINYAK DAN MINYAK BUMI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

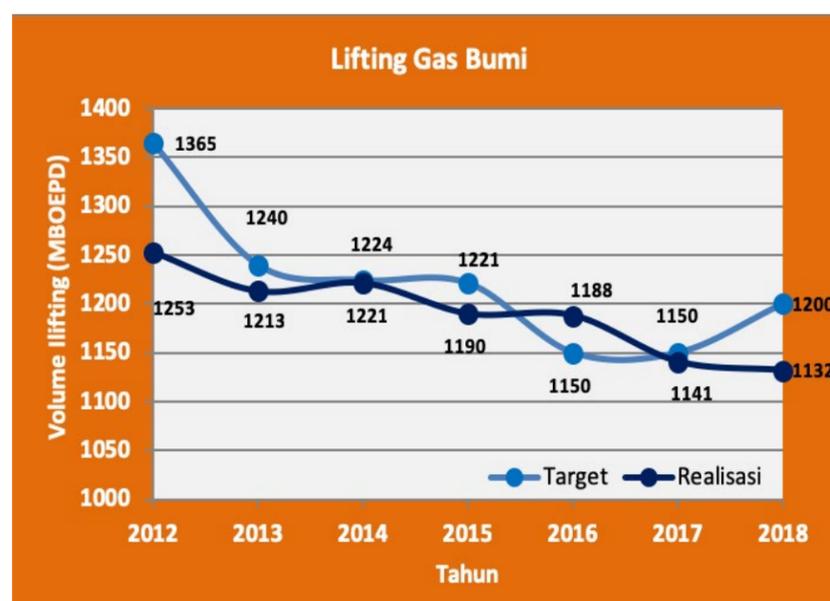
a. Volume Lifting Minyak Bumi

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 1 perkembangan lifting minyak bumi dari tahun 2012 sampai dengan terakhir tahun 2018 terus mengalami penurunan. Tercatat sampai semester 1 tahun 2018 realisasi lifting migas mencapai 771 MBOPD dari angka yang di targetkan berdasarkan APBN 2018 sebesar 800 MBOPD. Penurunan produksi ini dikarenakan Penurunan performance reservoir secara alami (natural decline) dan juga tidak ditemukan cadangan besar yang akan menggantikan produksi minyak yang terus menurun.



b. Volume Lifting Gas Bumi (MBOEPD)

Grafik 2 menunjukkan perkembangan volume lifting gas bumi selama periode 2012-2018. Tahun 2016 lifting gas bumi sebesar 1.188 MBOEPD. Data sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi lifting gas bumi sebesar 1.132 MBOEPD dengan target yang ditetapkan sesuai APBN 2018 sebesar 1.200 MBOEPD. Dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir realisasi lifting gas bumi mengalami penurunan karena minimnya penemuan cadangan baru untuk meningkatkan produksi migas.



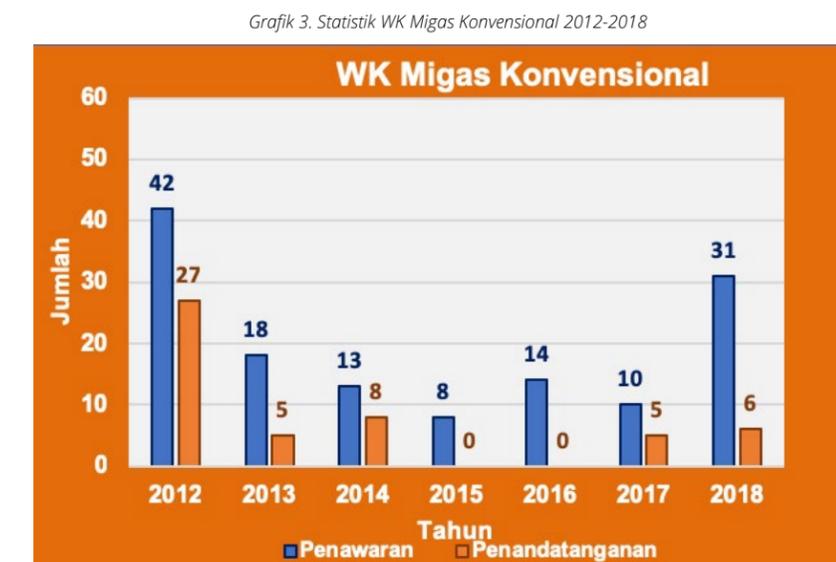
Grafik 2. Lifting Gas Bumi Tahun 2013-2017

JUMLAH PENAWARAN KONTRAK KERJA SAMA ATAU WK MINYAK DAN GAS BUMI

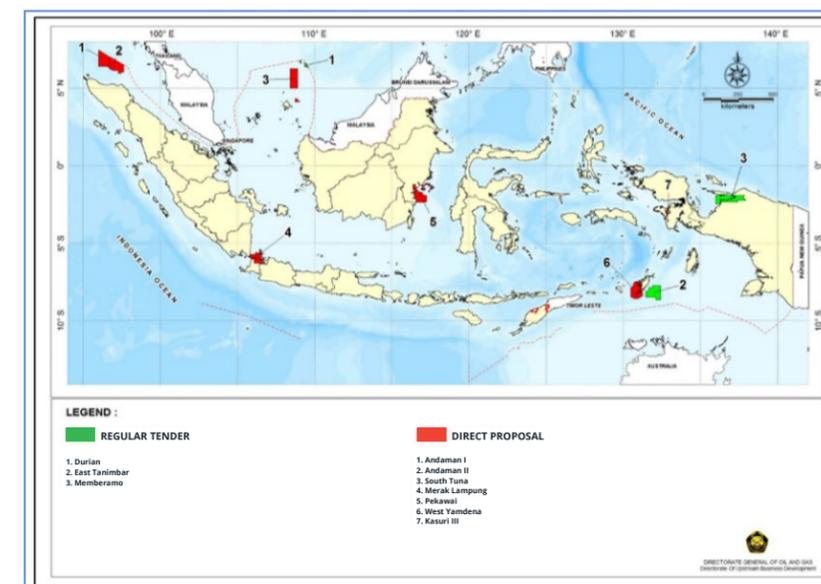
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Wilayah Kerja Konvensional

Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional melalui lelang wilayah kerja selama periode 2012-2016 mengalami kecenderungan trend menurun sebagaimana terlihat pada Grafik 3. Penurunan trend tersebut disebabkan oleh semakin terbatasnya prospektif area yang ditawarkan serta kecenderungan penurunan minat investasi perusahaan migas karena harga minyak mentah dunia dan faktor terms & conditions yang diberikan. Namun pada tahun 2017 penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional mulai mengalami kenaikan trend dengan mulai diterapkan sistem Kontrak Gross Split.



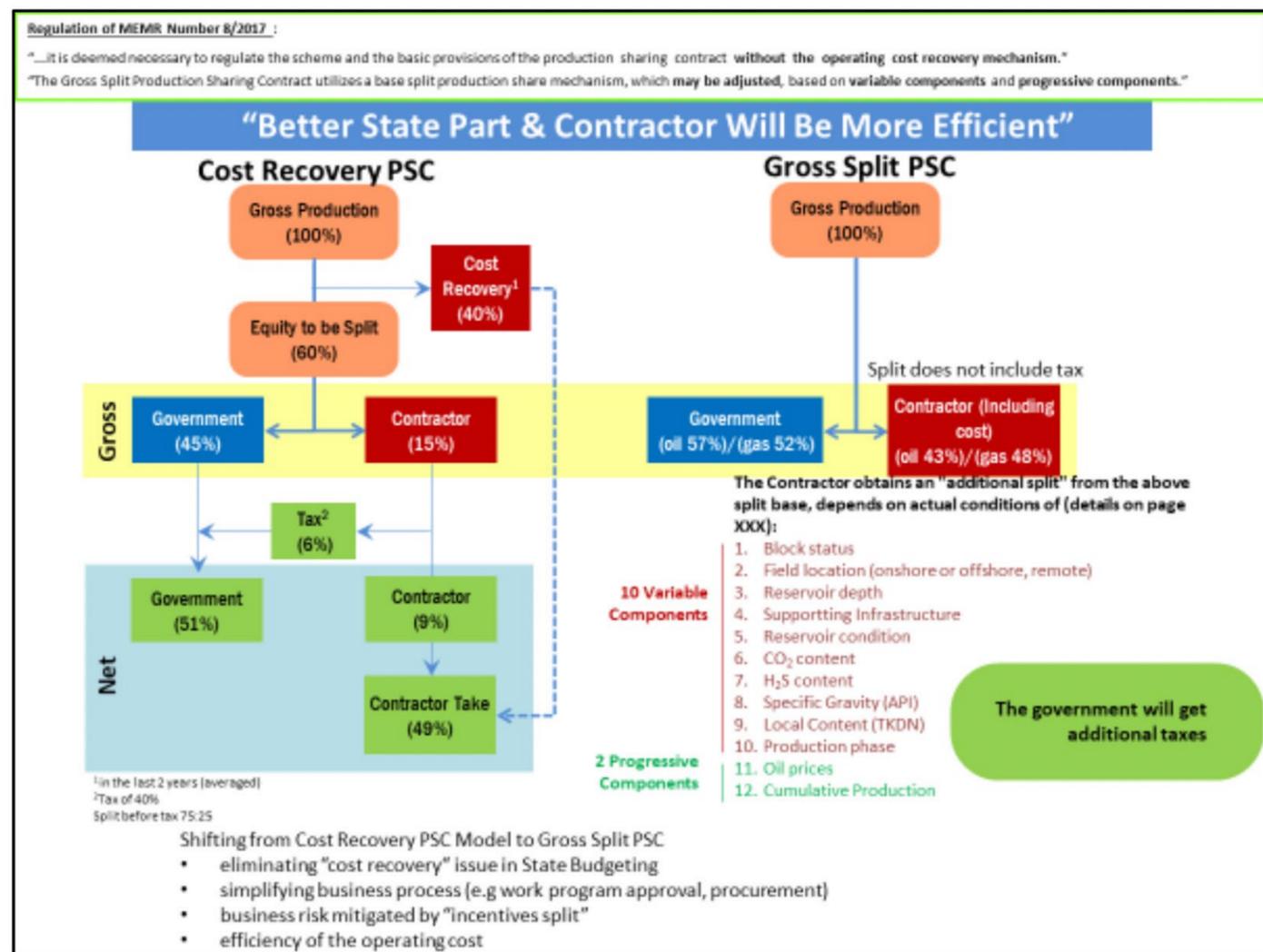
Pada tahun 2017, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional dengan jumlah penawaran sebanyak 10 wilayah kerja yang terdiri dari 3 (tiga) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung sebagaimana terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017

Pada penawaran tersebut, Pemerintah berusaha menarik minat investor dengan menerapkan skema PSC Gross Split pertama kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Permen 8 Tahun 2017 tentang PSC Gross Split. Dari Gambar 4 terlihat bahwa seluruh WK memiliki bagi hasil (base Split) yang sama yaitu 57:43 untuk minyak bumi dan 52:48 untuk gas bumi. Split tersebut dapat disesuaikan terhadap komponen variabel yang ditentukan pada saat pengembangan lapangan serta disesuaikan terhadap

komponen progresif yang ditentukan pada masa produksi. Melalui penerapan skema PSC Gross Split diharapkan dapat mendorong kegiatan Eksplorasi dan Produksi lebih efektif dan cepat, mendorong para kontraktor Migas dan Industri Penunjang Migas untuk lebih efisien, mendorong proses bisnis Kontraktor Hulu Migas (KKKS) dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel, dan mendorong KKKS untuk mengelola biaya operasi dan investasinya dengan berpijak kepada sistim keuangan korporasi bukan sistim keuangan negara, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.



Gambar 6. Konsep PSC Gross Split

Dikarenakan Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 terbit pada saat Penawaran WK telah diumumkan, Pemerintah memberikan waktu tambahan kepada calon peserta lelang untuk mempelajari konsep PSC Gross Split dan menyampaikan dokumen partisipasi sampai dengan 29 Desember 2017. Dalam pelaksanaan Lelang WK tersebut dilakukan perpanjangan sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan menunggu pengesahan PP Perpajakan Gross Split.

Sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 27 November 2017 jumlah Bid Document yang diakses adalah 13 (tiga belas) dokumen untuk 7 (tujuh) Wilayah Kerja, yaitu: WK Andaman I, Andaman II, South Tuna, Merak Lampung, Pekawai, West Yamdena dan Kasuri III. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2017 sebagaimana di tunjukan pada Tabel 2 berikut:

NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1	ANDAMAN I	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: MP (ANDAMAN 1) RSC LTD, Komitmen: G&G, Survey Seismik 3D 500 Km2 Bonus Tanda Tangan: US\$ 750.000
2	ANDAMAN II	3 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Konsorsium PREMIER OIL ANDAMAN LIMITED, KRISENERGY (ANDAMAN II) LTD, MP (ANDAMAN 2) RSC LTD, Komitmen: G&G, Survey Seismik 3D 1.850 Km2 Bonus Tanda Tangan: US\$ 1.000.000
3	KASURI III	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4	MERAK – LAMPUNG	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: PT. BALMORAL GAS, Komitmen: G&G dan Survey Seismik 2D 500 Km Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000
5	PEKAWAI	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: PT. SAKA ENERGI SEPINGGAN, Komitmen: G&G dan Pemboran 1 Sumur Eksplorasi Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000
6	SOUTH TUNA	Tidak Ada	Tidak Ada	-
7	WEST YAMDENA	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: PT. SAKA ENERGI YAMDENA BARAT, Komitmen: G&G dan Survey Seismik 2D 1000 Km Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000

Tabel 2. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2017

Sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 27 November 2017 jumlah Bid Document yang diakses adalah 6 (enam) dokumen untuk 3 (tiga) Wilayah Kerja, yaitu WK Tongkol, Mamberamo dan East Tanimbar. Hasil Akhir Lelang Reguler Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

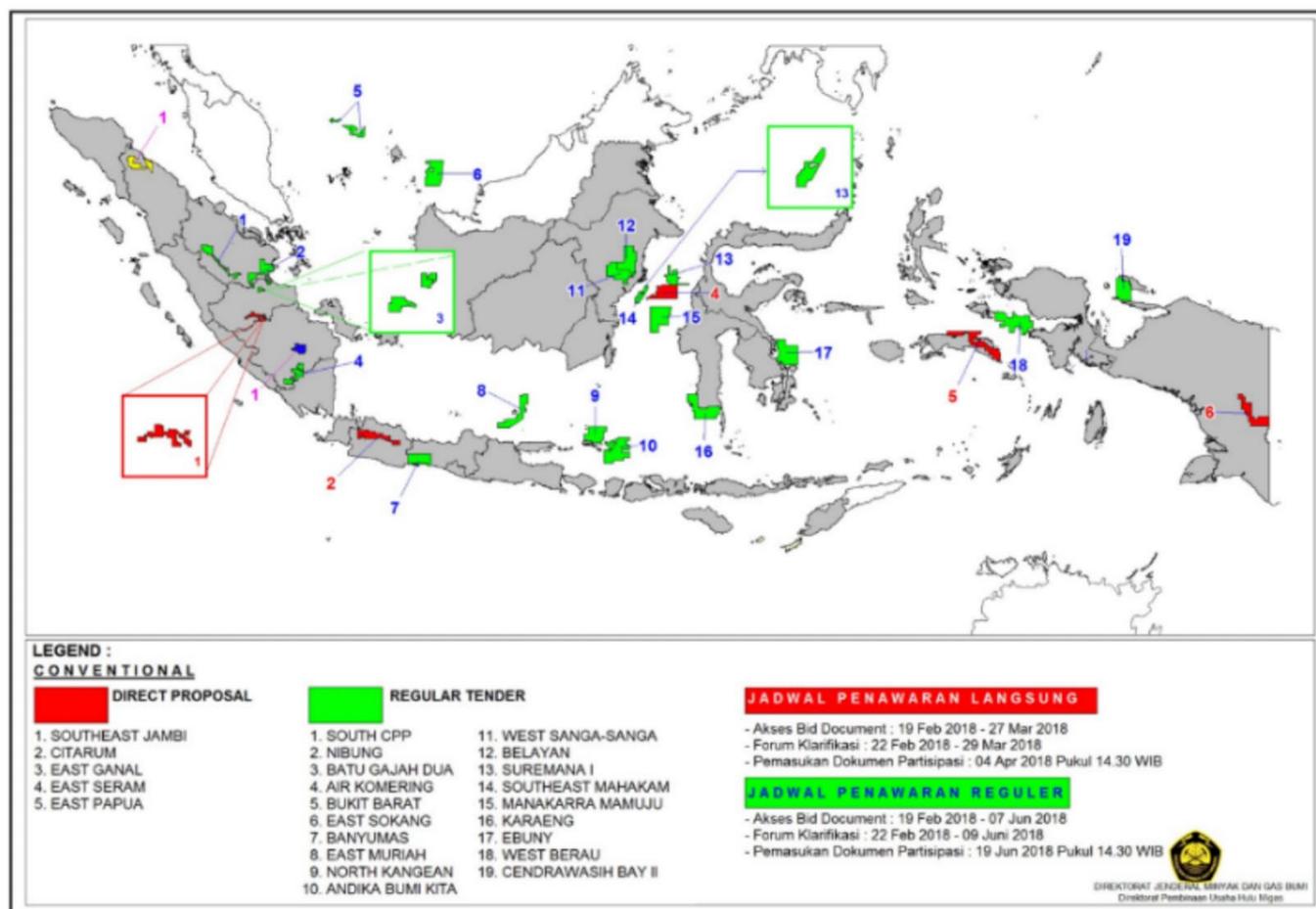
NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1	Tongkol	Tidak Ada	Tidak Ada	-
2	Mamberamo	Tidak Ada	Tidak Ada	-
3	East Tanimbar	Tidak Ada	Tidak Ada	-

Tabel 3. Hasil Lelang Akhir Reguler Tahun 2017

Terdapat 5 WK hasil lelang 2017 yaitu WK Andaman I dengan pemenang lelang MP (Andaman 1) RSC Ltd, Andaman II dengan pemenang lelang Konsorsium Premier Oil Andaman Limited, Krisenergy (Andaman II) Ltd, MP (Andaman 2) RSC Ltd, Merak Lampung dengan pemenang lelang PT. Balmoral Gas, Pekawai dengan pemenang lelang PT. Saka Energy Sepinggan, dan West Yamdena dengan pemenang lelang PT. Saka Energi Yamdena Barat.

Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional tahap I dengan jumlah penawaran sebanyak 24 wilayah kerja yang terdiri dari 5 (lima) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung dan 19 (sembilan belas) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler sebagaimana terlihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2018

Sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 27 Maret 2018 jumlah Bid Document yang diakses adalah 10 (sepuluh) dokumen untuk 5 (lima) Wilayah Kerja, yaitu: WK East Ganal, Citarum, Southeast Jambi, East Seram, dan East Papua. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1	CITARUM	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Konsorsium PT Cogen Nusantara Energi-PT Green World Nusantara, Komitmen: G&G dan Survey Seismik 2D 300 Km Bonus Tanda Tangan: US\$ 750.000
2	EAST GANAL	2 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Eni Indonesia Ltd, Komitmen: Pemboran 1 Sumur Eksplorasi Bonus Tanda Tangan: US\$ 1.500.000
3	EAST SERAM	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Lion Energy Limited, Komitmen: G&G dan Survey Seismik 2D 500 Km Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000
4	SOUTHEAST JAMBI	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Konsorsium Talisman West Bengara B.V & MOECO South Sumatra Co., Ltd, Komitmen: G&G dan Survey Seismik 2D 300 Km Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000
5	EAST PAPUA	Tidak Ada	Tidak Ada	-

Tabel 4. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2017

Sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 7 Juni 2018 jumlah Bid Document yang diakses adalah 7 (tujuh) dokumen untuk 5 (lima) Wilayah Kerja, yaitu WK Air Komerling, Bukit Barat, Andika Bumi Kita, South East Mahakam, dan Ebuny. Hasil Akhir Lelang Reguler Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1	Andika Bumi Kita	Tidak Ada	Tidak Ada	-
2	Air Komerling	Tidak Ada	Tidak Ada	-
3	Banyumas	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4	Batu Gajah Dua	Tidak Ada	Tidak Ada	-
5	Belayan	Tidak Ada	Tidak Ada	-
6	Bukit Barat	Tidak Ada	Tidak Ada	-
7	Cendrawasih Bay II	Tidak Ada	Tidak Ada	-
8	East Muriah	Tidak Ada	Tidak Ada	-
9	East Sokang	Tidak Ada	Tidak Ada	-
10	Ebuny	Tidak Ada	Tidak Ada	-
11	Karaeng	Tidak Ada	Tidak Ada	-
12	Manakarra Mamuju	Tidak Ada	Tidak Ada	-
13	Nibung	Tidak Ada	Tidak Ada	-
14	North Kangean	Tidak Ada	Tidak Ada	-
15	South CPP	Tidak Ada	Tidak Ada	-
16	South East Mahakam	Tidak Ada	Tidak Ada	-
17	Suremana I	Tidak Ada	Tidak Ada	-
18	West Berau	Tidak Ada	Tidak Ada	-
19	West Sanga-Sanga	Tidak Ada	Tidak Ada	-

Tabel 5. Hasil Akhir Lelang Reguler Tahun 2017

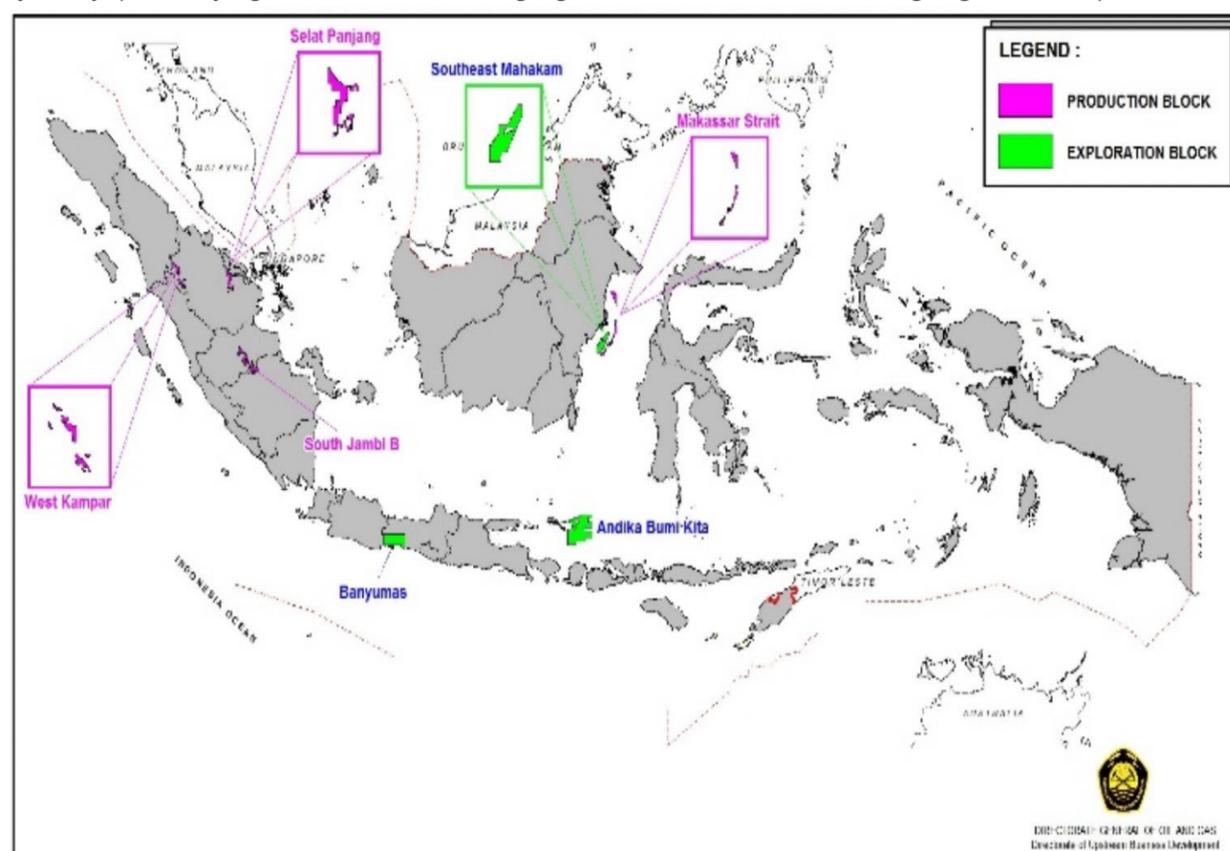
Terdapat 4 WK hasil lelang tahap I tahun 2018 yaitu WK Citarum dengan pemenang lelang Konsorsium PT Cogen Nusantara Energi-PT Green World Nusantara, East Ganal dengan pemenang lelang Eni Indonesia Ltd, East Seram dengan pemenang lelang Lion Energy Limited, dan Southeast Jambi dengan pemenang lelang Konsorsium Talisman West Bengara B.V & MOECO South Sumatra Co., Ltd.

Penawaran WK Migas Konvensional Tahap II Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional tahap II dengan jumlah penawaran sebanyak 7 wilayah kerja yang terdiri dari 4 (empat) wilayah kerja produksi yang ditawarkan melalui lelang reguler

dan 3 (tiga) wilayah kerja eksplorasi yang ditawarkan melalui lelang reguler sebagaimana terlihat pada Gambar 8.

Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 jumlah Bid Document yang diakses adalah 22 (dua puluh dua) dokumen untuk 7 (tujuh) Wilayah Kerja, yaitu: WK Andika Bumi Kita, Banyumas, Southeast Mahakam, Makassar Strait, Selat Panjang, South Jambi B, dan West Kampar. Dari 22 (dua puluh dua) dokumen yang diakses, terdiri dari 1 (satu) dokumen untuk WK Eksplorasi Banyumas dan 21 (dua puluh satu) dokumen untuk WK Produksi, 5 (lima) Makassar Strait, 7 (tujuh) Selat Panjang, 5 (lima) South Jambi B, dan 4 (empat) West Kampar. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2018 pada Table 5.



Gambar 8. Penawaran WK Migas Konvensional Tahap II Tahun 2018

NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1	ANDIKA BUMI KITA	Tidak Ada	Tidak Ada	-
2	BANYUMAS	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: PT Minarak Brantas Gas Komitmen: G&G, dan Pemboran 1 Sumur Eksplorasi Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000

3	SOUTHEAST MAHAKAM	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4	MAKASSAR STRAIT	1 Peserta	Tidak Ada	Penawaran peserta lelang tidak sesuai dengan T&C
5	SELAT PANJANG	2 Peserta	Tidak Ada	Penawaran peserta lelang tidak memenuhi persyaratan minimal dan tidak sesuai dengan T&C
6	SOUTH JAMBI B	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Hong Kong Jindi Group CO., Ltd Komitmen: G&G, Survey Seismik 3D 400 Km ² , Survey Seismik 2D 300 Km ² , dan Pemboran 3 Sumur Eksplorasi Bonus Tanda Tangan: US\$ 5.000.000
7	WEST KAMPAR	-	-	Masih dalam proses lelang

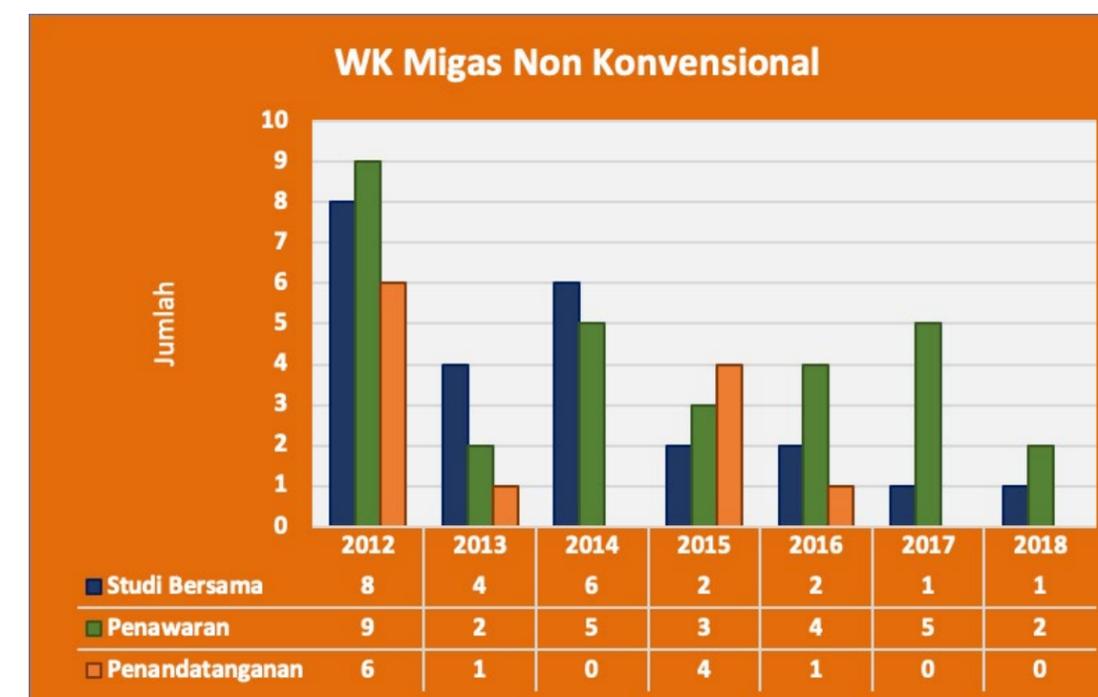
Tabel 6. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2018

Terdapat 2 WK hasil lelang tahap II tahun 2018 yaitu WK Banyumas dengan pemenang lelang PT Minarak Brantas Gas dan WK South Jambi B dengan pemenang lelang Hong Kong Jindi Group CO., Ltd, Sedangkan untuk WK West Kampar masih dalam proses lelang sampai dengan 22 Oktober 2018.

b. Wilayah Kerja Non Konvensional

Pengembangan Migas Non Konvensional di Indonesia dimulai pada tanggal 27 Mei 2008 dengan ditandatanganinya

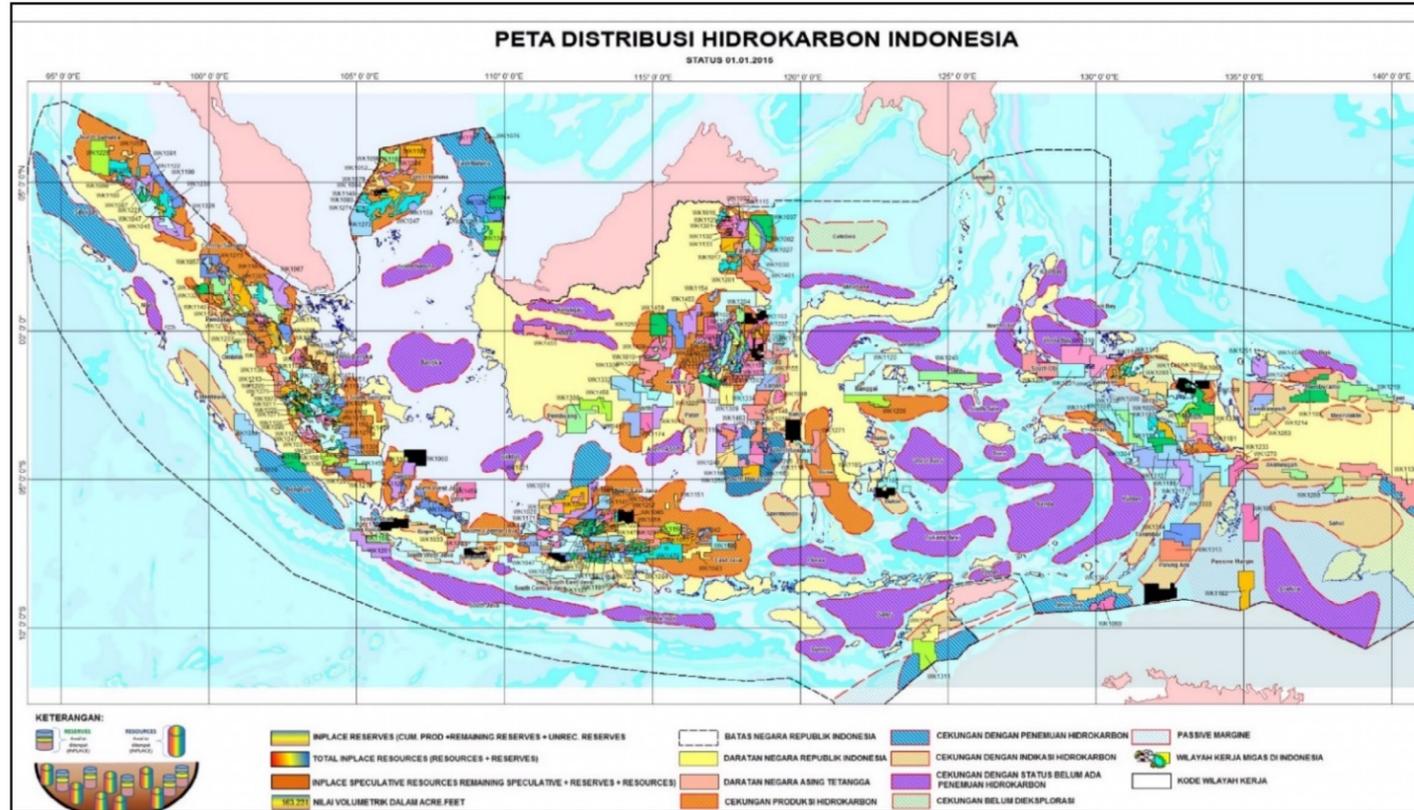
Kontrak Kerja Sama Gas Metana Batubara pertama. Dan kemudian bertambah hingga 54 wilayah kerja sampai dengan 2012 dan kemudian dilanjutkan oleh pengembangan Shale Gas yang ditandai dengan penandatanganan WK Migas Non Konvensional (Shale Gas) mulai 31 Januari 2013. Hingga tahun 2018 terdapat enam wilayah WK Migas Non Konvensional (Shale Gas) yang telah berjalan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan cadangan migas nasional yang sudah mulai mengalami penurunan.



Grafik 4. Jumlah Kegiatan Studi Bersama, Penawaran WK, dan Tandatangan KKS

Terdapat dua isu utama tentang pengembangan migas non konvensional, isu pertama untuk Gas Metana Batubara adalah bagaimana gas metana batubara dapat berproduksi secara komersial. Sudah terdapat beberapa wilayah kerja yang sudah melakukan tes produksi dan menunjukkan adanya potensi gas metana batubara. Untuk selanjutnya peran pemerintah untuk membantu para investor tersebut untuk mempermudah kontraktor sehingga potensi gas metana batubara tersebut bisa diproduksi secara ekonomis.

Isu yang kedua adalah untuk migas non konvensional khususnya shale hidrokarbon, dimana untuk eksplorasi hanya terdapat 6 wilayah kerja aktif, sehingga masih belum terbuktinya potensi migas non konvensional di Indonesia meskipun sumber dayanya yang cukup besar. Beberapa masalah antara lain perbedaan sifat fisik batuan shale yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri yang sudah berproduksi.



Gambar 9. Peta Distribusi Hidrokarbon Indonesia

Beberapa progres yang dikerjakan dalam pengembangan wilayah kerja migas non konvensional akan dilakukan penyempurnaan baik dalam penyiapan wilayah kerja, sistem pelelangan hingga terms & conditions dan bentuk

kontrak yang diberlakukan. Sehingga, diharapkan dari upaya tersebut dapat membantu pencapaian target berupa penandatanganan 2 (dua) KKS Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.

CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Cadangan Minyak Bumi

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 5, cadangan minyak Indonesia (termasuk kondensat) terus mengalami penurunan seiring dengan minimnya penemuan cadangan baru sampai dengan tahun 2016. Sementara Tahun 2017 terjadi peningkatan cadangan, tercatat total cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.534 MMSTB dengan jumlah cadangan terbukti sebesar 3.171 MMSTB dan cadangan potensial sebesar 4.364 MMSTB. Dari segi prosentase capaian, selama lima tahun terakhir pencapaian cadangan minyak bumi dapat dikatakan cenderung baik mengingat presentase yang diperoleh seluruhnya mencapai lebih dari 100%.

Grafik 5. Cadangan Minyak Bumi Indonesia



Cadangan ini meningkat sampai dengan 284 MMSTB jika dibandingkan dengan tahun 2016. Selama 3 tahun terakhir (Grafik 6), pencapaian realisasi cadangan minyak bumi telah melebihi target. Peningkatan cadangan di tahun 2017 ini disebabkan oleh cadangan kondensat pada Lapangan Abadi.

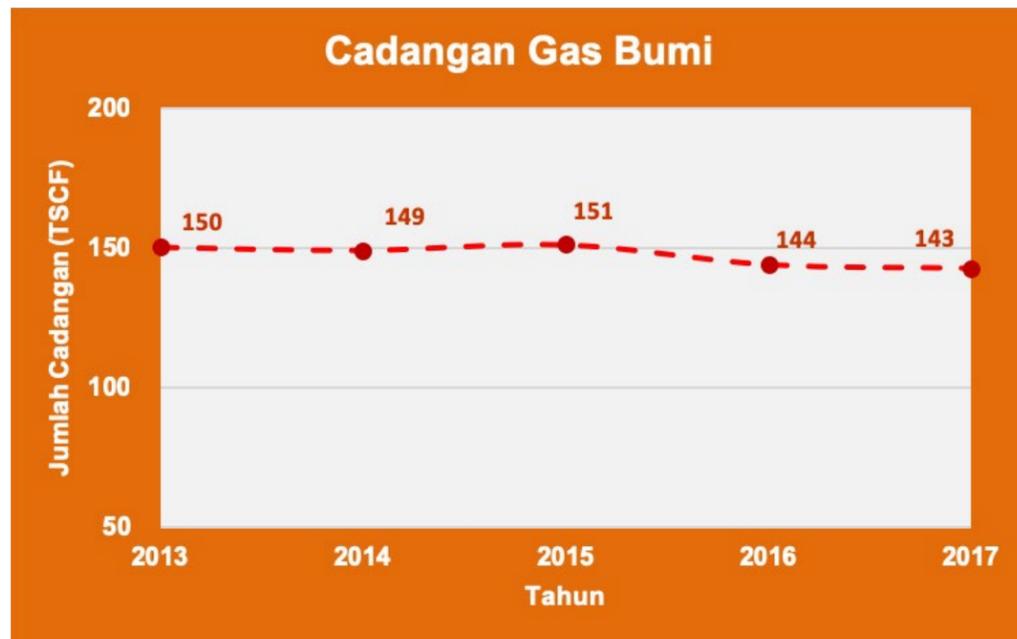
Grafik 6. Target dan Realisasi Cadangan Minyak Bumi



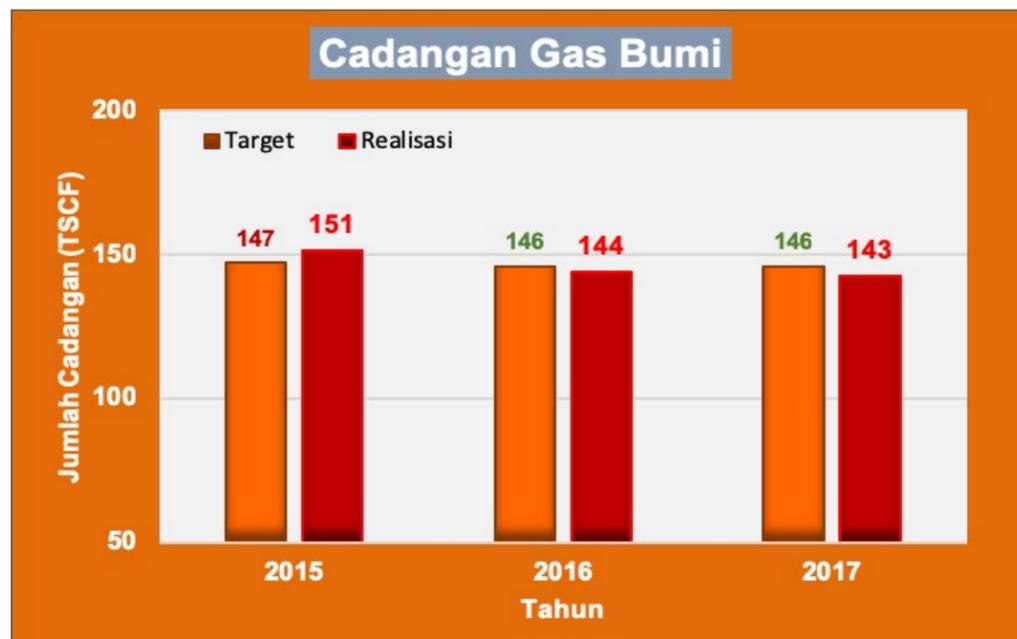
b. Cadangan Gas Bumi

Sebagaimana cadangan minyak bumi, cadangan gas bumi Indonesia pun selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan (Grafik 7). Meskipun pencapaian cadangan gas bumi pada tahun 2017 masih kurang dari target, persentase angka pencapaian cadangan

gas bumi masih berada di atas 90% (Grafik 8). Realisasi lebih dari 90 % untuk cadangan gas bumi ini tidak hanya pada tahun 2017 saja, namun itu terjadi di tahun sebelumnya seperti tahun 2016. Bahkan pada tahun 2015, pencapaian melebihi target 147 TSCF dengan realisasi sebesar 151 TSCF.



Grafik 7. Cadangan Gas Bumi Indonesia



Grafik 8. Target dan Realisasi Cadangan Gas Bumi Indonesia

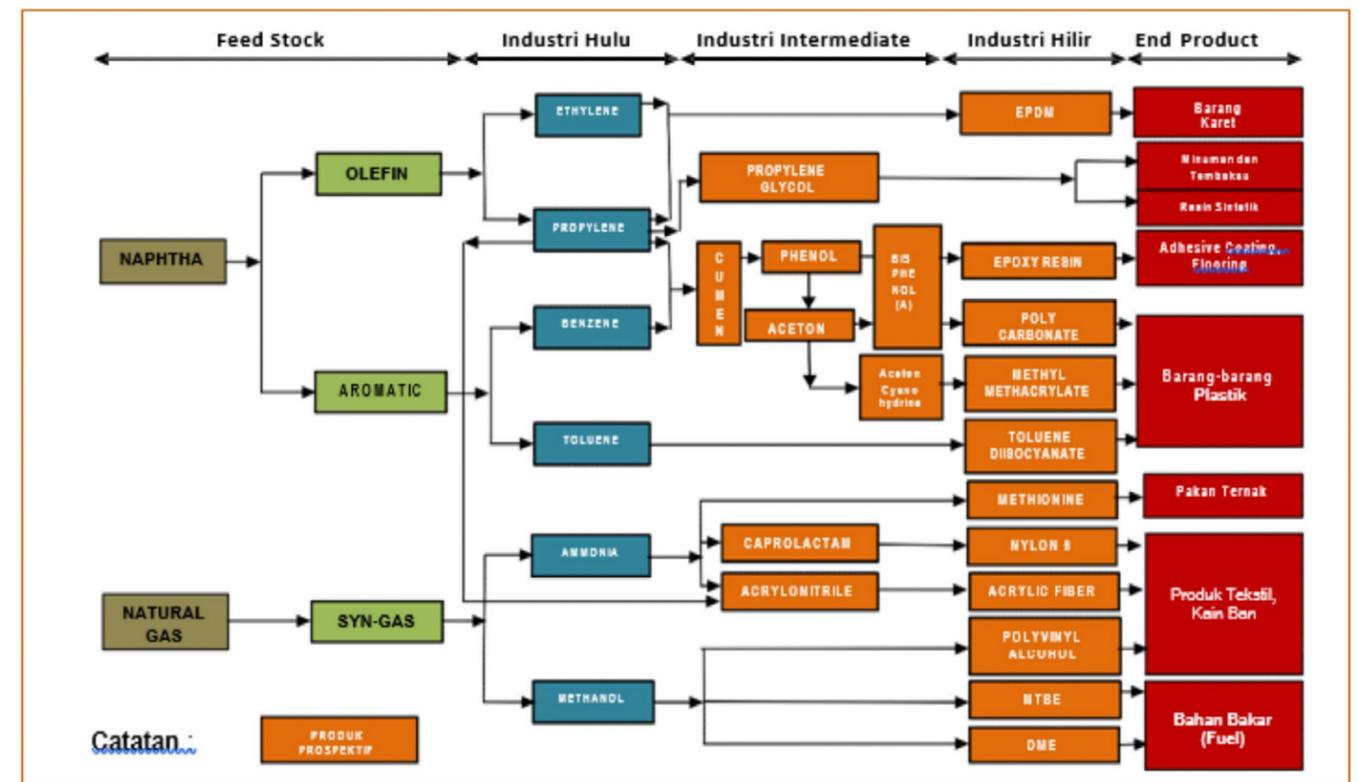
PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Persentase Alokasi Gas Domestik

Dalam tujuan "terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik", ditegaskan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya migas sebagai bahan baku dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, telah dicantumkan target alokasi gas bumi untuk

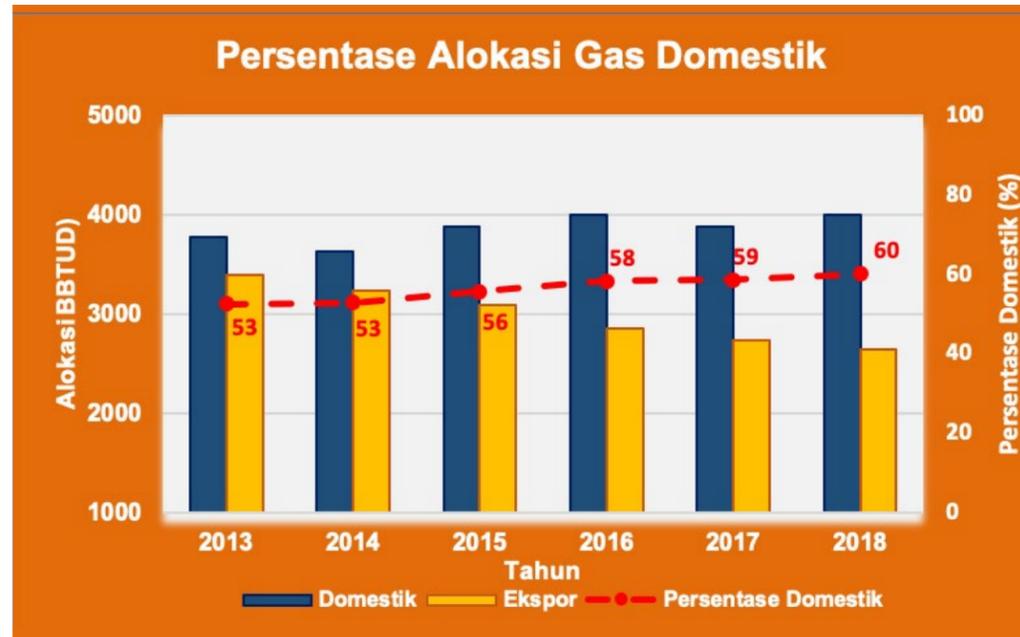
kebutuhan domestik yang meningkat setiap tahunnya selama periode 2015-2019. Pemanfaatannya gas bumi dapat digunakan untuk tenaga listrik (PLTG), lifting minyak, penggunaan ammonia dan urea, bahan bakar pengganti minyak baik untuk industri, rumah tangga dan transportasi.



Gambar 10. Pohon Industri Petrokimia (Sumber: Petrokimia Gresik)

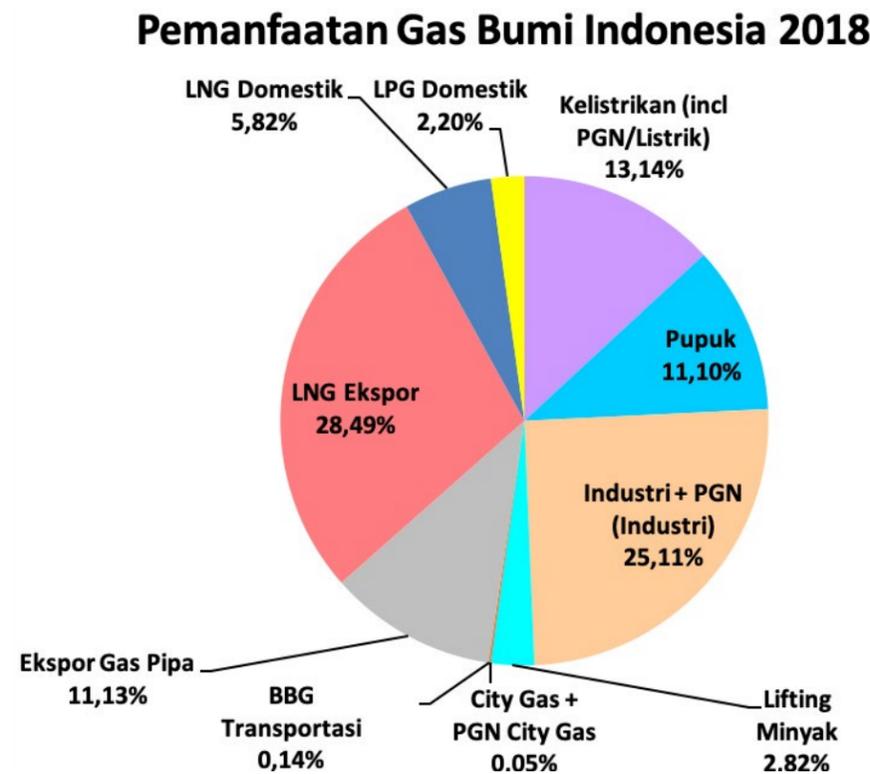
Industri gas bumi memiliki kompleksitas yang tinggi, terlihat dari proses produksi, pengangkutan, pemasaran, hingga pemanfaatan gas bumi di tingkat konsumen (Grafik 9). Oleh karena itu pemanfaatan gas bumi tidak hanya

memperhatikan alokasi gas buminya saja, tetapi metode pengangkutan dan strategis pemasarannya juga. Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi pemanfaatan gas bumi untuk domestik mencapai 60,2 %.



Grafik 9. Persentase Alokasi Gas Bumi Domestik

Realisasi rata-rata bulan September 2018 pemanfaat gas bumi Indonesia adalah sebagai berikut:



Grafik 10. Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2018

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Fasilitas Pembangunan FSRU

Pembangunan fasilitas FSRU Floating Storage & Regasification Unit di Cilegon, Banten oleh pihak swasta merupakan salah satu program/kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional guna mendukung kemandirian energi Nasional. FSRU Banten yang sedang dibangun ini telah diinisiasi semenjak tahun 2011 dan direncanakan akan beroperasi pada tahun

2015, namun karena terkendala beberapa faktor teknis dan non-teknis maka jadwal onstream mundur hingga tahun 2017, namun nampaknya di tahun 2017 ini pun belum dapat untuk terealisasi secara penuh. Fasilitas FSRU Banten terdiri dari kapal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan LNG dan terminal LNG di darat yang berfungsi sebagai fasilitas regasifikasi. Kemajuan proyek pembangunan FSRU ini sampai dengan September 2017 adalah sebesar 54,01 %. Sampai tahun 2018 tercatat belum ada realisasi terkait pembangunan FSRU ini.



Gambar 11. Lokasi Pembangunan FSRU Banten oleh Pihak Swasta

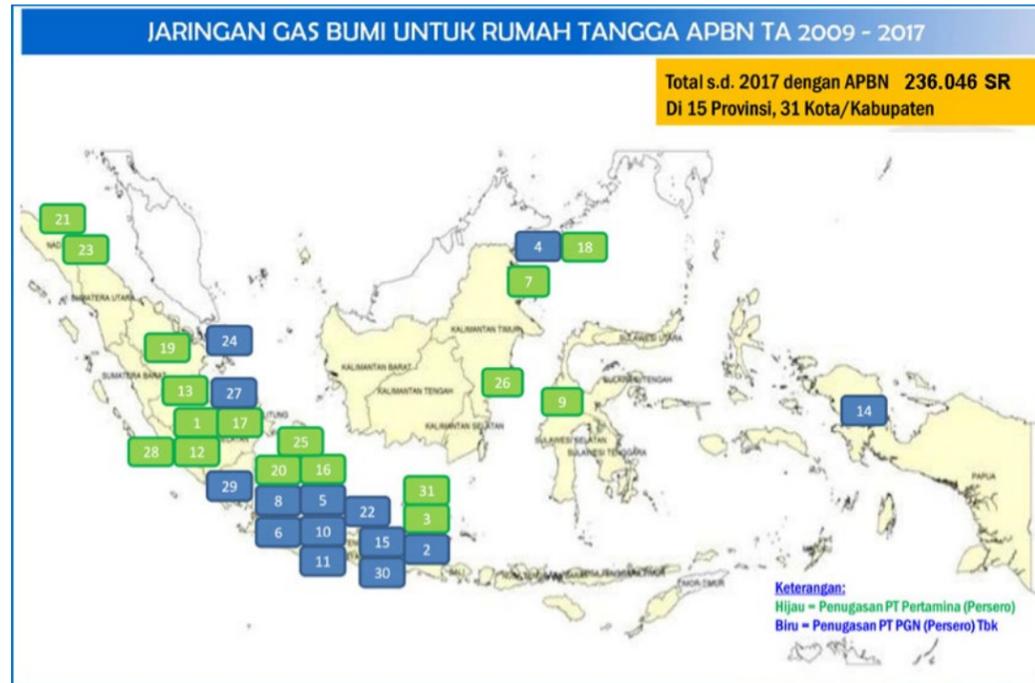
b. Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan lokasi di Kota Palembang dan Kota Surabaya. Pembangunan jaringan gas

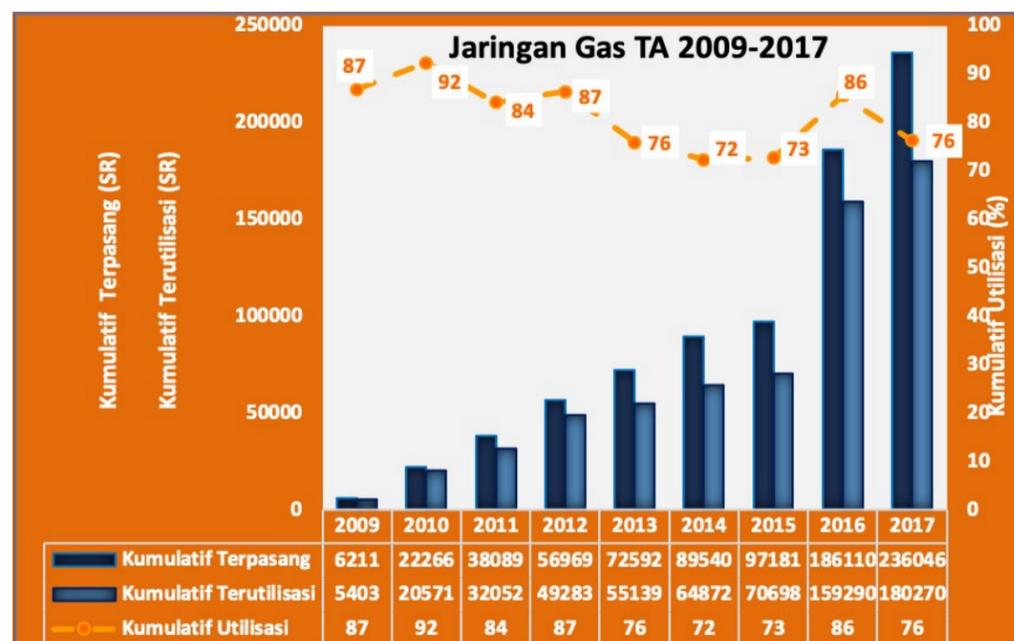
bumi untuk rumah tangga dilanjutkan sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Renstra pembangunan jaringan pipa gas bumi untuk rumah tangga tersebut. Kota yang tercantum pada Renstra bersifat fleksible karena

memperhitungkan faktor teknis yang baru dapat dipetakan pada saat rapat-rapat koordinasi pencarian pemasok gas. Berdasarkan kajian perhitungan keekonomian penghematan subsidi BBM melalui pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun 2009, dengan asumsi bahwa kebutuhan minyak tanah rata-rata/orang adalah 4,25 liter; jumlah anggota tiap rumah sebanyak 5 orang; jumlah

pelanggan terkonversi pada tahun 2009 adalah sebesar 7.400 Rumah Tangga; Subsidi minyak tanah sebesar Rp. 2.750/liter, maka penghematan yang didapatkan adalah sebesar Rp. 432,44 juta/bulan atau sebesar Rp. 5.189, 25 juta/tahun. Pembangunan Jaringan pipa gas untuk rumah tangga sampai dengan tahun 2017 sebanyak 236.046 SR yang dibangun di 31 Kota/Kabupaten.



Gambar 3. Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2009-2016



Grafik 11. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2009-2017

Pada tahun 2018 kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di 18 lokasi dengan jumlah

sambungan sebanyak 89.664 SR. Progres infrastruktur sampai tanggal 9 November 2018 adalah sebagai berikut :

NO	PAKET	KEGIATAN	OUTPUT	REALISASI FISIK (%)
1	1	Kota Medan	5.656 SR	78,78
2		Kab. Deli Serdang	5.560 SR	
3		Kota Lhokseumawe	2.000 SR	
4	2	Kota Palembang	4.315 SR	68,88
5		Kota Prabumulih	6.018 SR	
6		Kab. Musi Rawas	5.182 SR	
7	3	Kab. Serang	5.043 SR	65,417
8		Kab. Bogor	5.120 SR	
9		Kota Cirebon	3.503 SR	
10	4	Kab. Sidoarjo	7.093 SR	84,006
11		Kota Pasuruan	6.314 SR	
12		Kota Probolinggo	5.025 SR	
13	5	Kota Balikpapan	5.000 SR	77,2
14		Kab. Penajam Paser Utara (PPU)	4.502 SR	
15		Kota Bontang	5.005 SR	
16	6	Kota Tarakan	4.695 SR	23,4
17		Kab. PALI	5.375 SR	
18		Kota Samarinda	4.500 SR	

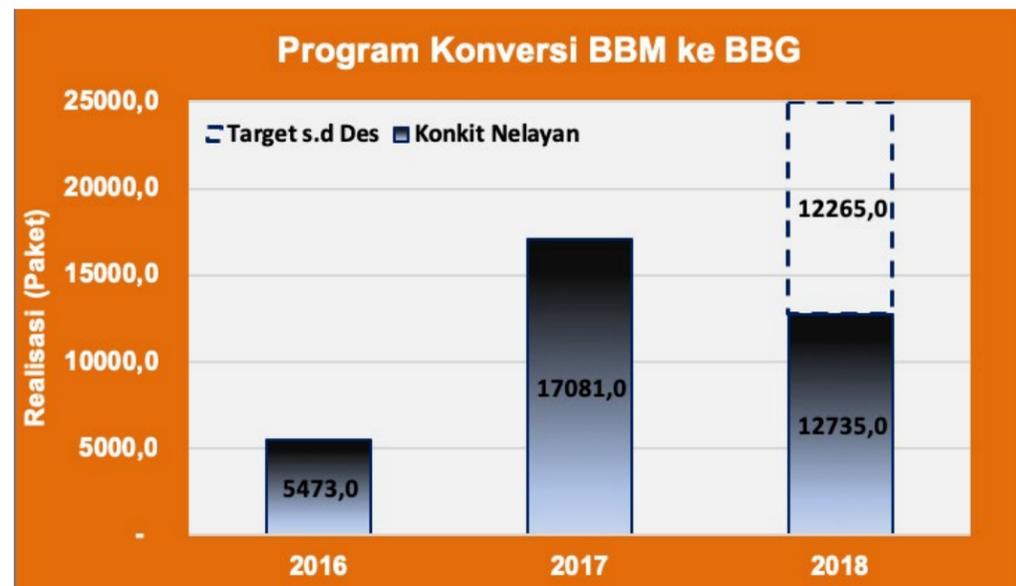
Tabel 7. Progress Pembangunan Jaringan Gas Tahun 2017

c. Konversi BBM ke BBG untuk kapal nelayan kecil

Berdasarkan PERPRES Nomor 126 tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil, Sejak Tahun 2016 kegiatan konversi BBM ke BBG untuk nelayan dilakukan dengan melakukan pembagian peralatan konversi. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nawacita yang mendukung ketahanan energi. Implikasi dengan adanya program ini adalah efisiensi penggunaan energi dan biaya. Pada Grafik 12

terlihat data realisasi Program konversi BBM ke BBG dari tahun 2016 sampai dengan 8 November 2018.

Pada tahun 2018, Dilakukan pembagian Paket Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan sebanyak 25.000 Paket, dibagi menjadi dua wilayah kerja, wilayah I sebanyak 7.792 dan wilayah II sebanyak 17.208 paket. Progress kegiatan sampai tanggal 8 November 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 berikut :



Grafik 12. Realisasi Konkit untuk Nelayan 2016-2018

NO	KAB/ KOTA	JUMLAH	TERBAGI
1	Kab. Cianjur	90	90
2	Kab. Labuhanbatu	310	310
3	Kab Gresik	701	701
4	Kab Trenggalek	649	649
5	Kab. Wonosobo	238	238
6	Kota Batam	429	429
7	Kab. Jepara	178	178
8	Kab. Labuhanbatu Utara	59	59
9	Kota Surabaya	180	0
10	Kab. Cirebon	140	140
11	Kab. Mandailing Natal	341	0
12	Kab Pasuruan	631	25
13	Kota Pekanbaru	67	67
14	Kodya Jakarta Utara	80	0
15	Kab Sidoarjo	195	0
16	Kab. Pesisir Selatan	585	10
17	Kab. Indragiri hilir	207	0

18	Kab. Tapanuli Tengah	420	0
19	Kab Tuban	200	50
20	Kab Probolinggo	494	10
21	Kab. Kampar	406	0
22	Kab Lamongan	608	608
23	Kab. Padang Pariaman	314	0
24	Kab. Samosir	100	100
25	Kota Pasuruan	80	0
26	Kota Palembang	90	90

Tabel 8. Progress Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Wilayah I

NO	KAB/ KOTA	JUMLAH	TERBAGI
1	Lombok Tengah	500	500
2	Mataram	200	200
3	Karangasem	1,081	1,081
4	Sinjai	253	253
5	Bone	947	491
6	Lombok Timur	571	0
7	Lombok Utara	650	0
8	Kotabaru	221	221
9	Tanah bumbu	214	214
10	Balikpapan	113	113
11	Mempawah	214	214
12	Tarakan	880	880
13	Samarinda	143	143
14	Singkawang	92	92
15	Bontang	113	113
16	Wajo	582	210

17	Kukar	1,815	1
18	Takalar	953	953
19	Selayar	1,261	1,261
20	Jeneponto	1	1
21	bulukumba	900	0
22	Gorontalo Utara	800	800
23	Minahasa Utara	1	1
24	Banggai	563	563
25	Pohuwato	798	349
26	Boalemo	700	327
27	Manado	144	0

Tabel 9. Progress Kegiatan Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Wilayah II

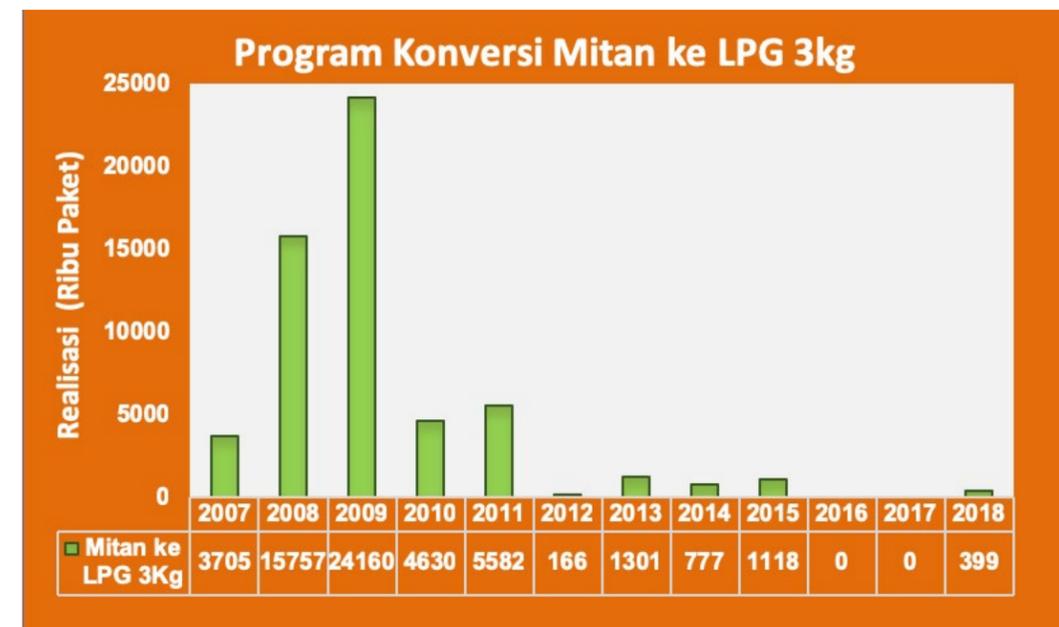
d. Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg

Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan program nasional yang dimulai pada tahun 2007 lalu dengan diterbitkannya landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Tujuan dari Program konversi Mitan ke LPG adalah

1. Melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM
2. Melakukan efisiensi anggaran Pemerintah
3. Mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi
4. Menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien.

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung LPG 3 Kg

dan kompor gas beserta peralatan lainnya dengan sasaran rumah tangga dan usaha mikro secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha dalam hal ini PT Pertamina (Persero) melalui penugasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penugasan kepada Pertamina dilakukan dengan pertimbangan Pertamina memiliki sumber daya manusia dan rantai distribusi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang akan memudahkan proses pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg tersebut di seluruh pelosok Indonesia. Komponen paket perdana LPG tabung 3 Kg yang terdiri atas kompor LPG, selang kompor LPG, tabung LPG beserta katup/valve dan karet perapat diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Berikut realisasi Konversi minyak tanah ke LPG 3 KG kurun waktu 2007-2018.



Grafik 13. Realisasi Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg 2007-2018

Pada tahun 2016 tidak ada pembagian. Pada tahun 2017 menargetkan 517.630 paket dapat tersalurkan, namun Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg ini tidak terlaksana karena anggaran ini termasuk dalam Inpres pemotongan anggaran

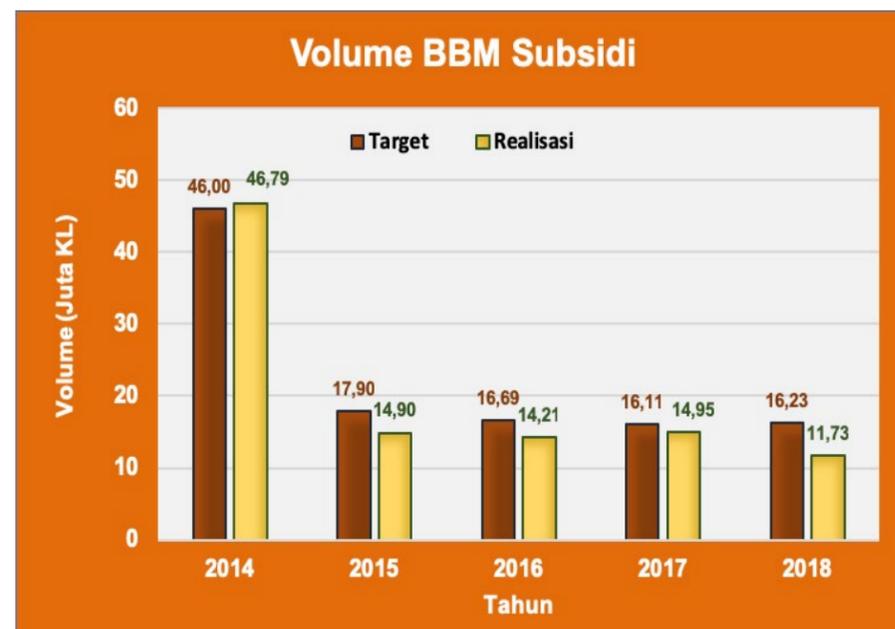
2017. Sedangkan realisasi sampai dengan 18 Oktober 2018 mencapai 399.300 Paket yang tersebar di beberapa Provinsi dari target 519.712 Paket di empat Provinsi yaitu Bangka Belitung, NTB, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

VOLUME BAHAN BAKAR BERSUBSIDI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Volume BBM Bersubsidi

Pada tahun 2018, penugasan penyaluran BBM diberikan kepada PT. Pertamina dan PT. AKR. Selanjutnya, data realisasi dimaksud diverifikasi oleh BPH Migas. Target dan Realisasi BBM Bersubsidi dari tahun ke tahun terus menurun. Penurunan tersebut seiring langkah pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke produktif berupa pembangunan infrastruktur. Saat ini, pemerintah sudah tidak memberikan subsidi ke Premium semenjak tahun 2016 tetapi hanya menetapkan subsidi tetap pada solar dan minyak tanah. Sampai dengan triwulan III 2018 realisasi BBM subsidi mencapai 11,73 Juta KL. Ini akan terus meningkat sampai dengan akhir Desember 2018. Adapun target dan realisasi BBM Bersubsidi selama lima tahun terakhir lebih rinci dapat terlihat pada Grafik 14 berikut:



Grafik 14. Volume dan Realisasi BBM Subsidi

b. Volume LPG Bersubsidi

Realisasi penyaluran LPG 3 Kg diperoleh dari data Pertamina dan diverifikasi oleh Ditjen Migas. Target volume LPG Bersubsidi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan diterapkannya program diversifikasi BBM ke Gas. Tercatat realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2018, volume LPG Bersubsidi sebesar 4,86 Juta M Ton dari target 6,45 Juta M Ton. Adapun target dan realisasi LPG Bersubsidi selama lima tahun terakhir lebih rinci dapat terlihat pada Grafik 15 berikut:



Grafik 15. Volume dan Realisasi LPG Bersubsidi 2014-2018

JUMLAH REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP TARGET APBN

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Berdasarkan Rapat Pemerintah dan DPR diperoleh asumsi makro yaitu lifting minyak bumi sebesar 800 MBOPD, lifting gas bumi sebesar 1.200 MBOED dan harga minyak (ICP) sebesar US\$ 48 barel. Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), Cost Recovery dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US\$. Tercatat realisasi sampai dengan 30 September 2018, lifting sebesar 771 MBOPD, lifting gas bumi sebesar 1.132

MBOEPD, dan ICP 68,25 US\$/Barrel. Berdasarkan asumsi itu maka penerimaan negara sektor migas dalam APBN 2018, mencapai 172,12 triliun rupiah. Kondisi ini merupakan prestasi karena adanya peningkatan penerimaan dibanding tahun 2017 yang jumlahnya hanya mencapai 138 triliun rupiah di tengah dinamika harga minyak dunia dan faktor lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Berikut data target dan realisasi PNBPN selama lima tahun terakhir pada Grafik 16.



Grafik 16. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Sektor Migas 2014-2018

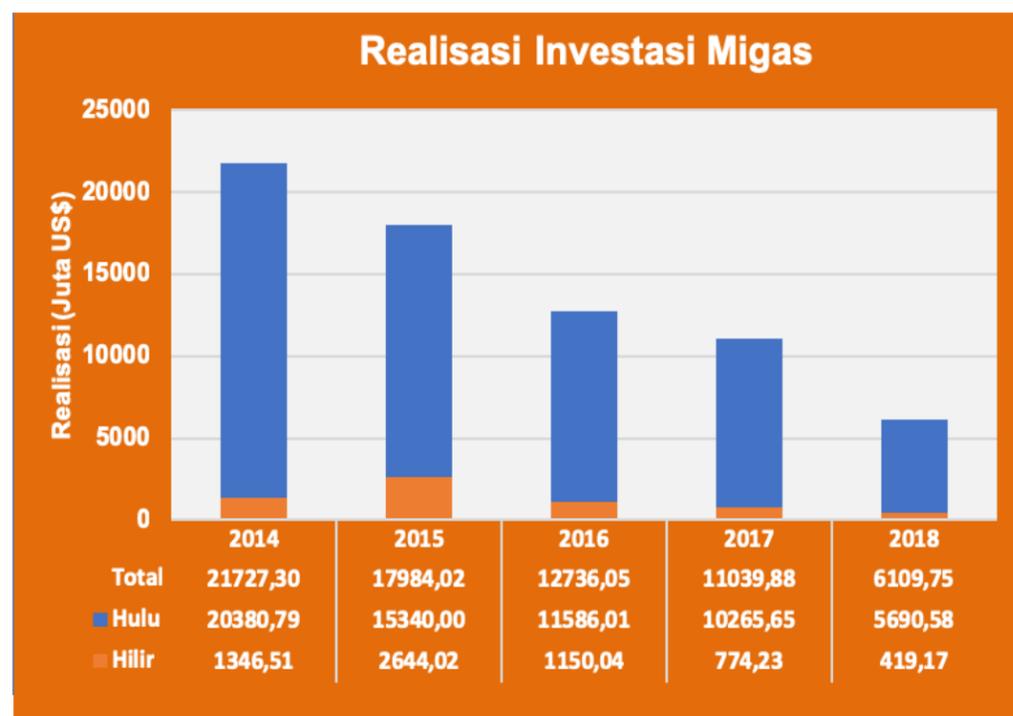
INVESTASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Realisasi investasi di kegiatan usaha Migas di sampai dengan 31 Agustus 2018 sebesar 6,11 Miliar USD berasal dari sektor hulu sebesar 5,69 Miliar USD nilai tersebut didapat dari expenditure KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi.

Di sektor hilir realisasi investasi sampai dengan 5 Oktober 2018, investasi hilir migas mencapai 0,42 Miliar USD. Kenaikan/penurunan nilai investasi migas disebabkan dari berbagai faktor antara lain kondisi investasi hulu dan hilir migas. Nilai investasi hulu migas variable yang paling dominan adalah harga minyak dunia. Kenaikan dan penurunan harga minyak

dunia akan langsung berpengaruh kepada nilai investasi migas di tahun tersebut. Harga minyak mentah dunia di tahun 2018 telah terjadi kenaikan dibanding tahun 2017. Harga minyak mentah di dunia tahun 2018 rata-rata berada di \$51/barrel dan di sepanjang tahun 2018 rata-rata berada di \$69.42/barrel. Nilai investasi hulu migas di bulan Agustus 2018 terjadi sedikit kenaikan dibandingkan status investasi hulu di bulan Agustus 2017. Di bulan Agustus 2017 nilai investasi hulu sebesar 3,99 Milliar US\$ dan di bulan Agustus 2018 sebesar 5,69 Milliar US\$. Sehingga Diproyeksikan akan ada kenaikan nilai investasi migas seiring dengan kenaikan harga minyak dalam tahun-tahun ke depan.



Grafik 17. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2014 - 2018

JUMLAH PERUSAHAAN MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN KERJA (ZERO ACCIDENT) DAN KEGAGALAN OPERASI (UNPLANNED SHUTDOWN) FATAL

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Hulu

Tercatat sampai dengan 2018 ini jumlah kecelakaan akibat kerja di kegiatan usaha hulu migas dengan kategori fatal sejumlah 2. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya juga 4. Sedangkan jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kategori berat adalah 3. Lebih lengkap selama 5 tahun terakhir jumlah kecelakaan kerja di kegiatan usaha hulu migas terlihat pada Grafik 18 berikut.



Grafik 18. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Sedangkan realisasi jumlah perusahaan migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan kegagalan operasi (unplanned Shutdown) fatal sejumlah 248 perusahaan dari angka target 90 perusahaan. Faktor eksternal seperti perubahan harga minyak memberi dampak yang cukup signifikan pada jumlah kecelakaan kerja di kegiatan usaha hulu migas. Hal ini dikarenakan penurunan harga minyak mentah dunia menyebabkan profit perusahaan berkurang sehingga perusahaan-perusahaan terkait terpaksa harus menekan biaya operasional. Salah satu biaya operasional yang dikurangi adalah biaya untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, meskipun

kegiatan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas senantiasa diperketat oleh Pemerintah, perubahan harga minyak bumi dunia ini cukup berdampak pada kegiatan usaha migas dan performa Badan Usaha dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada kegiatan usaha hulu perlu diterapkan lebih optimal. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Ini menandakan bahwa Pemerintah cukup berkomitmen dalam mendorong kegiatan usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan.

b. Hilir

Sepanjang tahun 2018, 200 badan usaha hilir migas yang dilakukan pengawasan oleh Ditjen Migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja, sehingga capaian adalah 100%. Di sector hilir tercatat total angka kecelakaan kerja sebanyak 26 yang terdiri dari 6 kecelakaan fatal, 2 berat, 5 sedang, dan 13 angka kecelakaan kategori ringan. Lebih lengkap selama 5 tahun terakhir jumlah kecelakaan kerja di kegiatan usaha hulu migas terlihat pada Grafik 19 berikut.



Grafik 19. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas

BAB 3 Rencana Kerja Tahunan 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

RKT 2019 merupakan penjabaran tahun keempat dari RENSTRA Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 dengan mempertimbangkan NAWACITA, DEKRIT PRESIDEN (penugasan) dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA 2010-2014. Dalam rangka mendukung hal-hal tersebut di atas, target-target di dalam RKT Ditjen Migas 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Optimalisasi penyediaan energi fosil	Lifting minyak dan gas bumi:			
	1	a. Lifting minyak bumi (APBN 2019)	MBOPD	775
		b. Lifting gas bumi (APBN 2019)	MBOEPD	1.250
	2	Jumlah Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi:		
		a. Konvensional	KKS	6
		b. Non Konvensional	KKS	2
	Cadangan minyak dan gas bumi:			
	3	a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	5.747
		b. Cadangan gas bumi	TCF	142
	Meningkatkan alokasi energi domestik	Pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri:		
4		a. Persentase alokasi gas domestik	%	64
		b. Fasilitas pembangunan Floating Storage and Regasification Unit/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas Terminal	Unit	1

Meningkatkan akses dan infrastruktur energi	5	Volume BBM bersubsidi (APBN 2019)	Juta KL	15,11
	Kapasitas Kilang BBM:			
	6	a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri; dan	Juta KL	42
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BPD	1.169
	7	Kapasitas terpasang Kilang LPG	Juta MT	4,74
	8	Volume LPG bersubsidi (PBN 2019)	Juta MT	6,978
	Pembangunan Jaringan Gas Kota:			
	9	a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota; dan	Lokasi	18
		b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	78.216
	10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas*)	Lokasi	1
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral	11	Penerimaan Negara dari subsektor minyak dan gas bumi (APBN 2019)	Triliun Rp	234,73
Meningkatkan investasi sektor energi dan sumber daya mineral	12	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan subsektor minyak dan gas bumi sesuai program legislasi nasional	Peraturan	15
	13	Investasi subsektor minyak dan gas bumi	Miliar US\$	13,425
Terwujudnya lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang minyak dan gas bumi	14	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	30
	15	Jumlah perusahaan hulu dan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal		Perusahaan
		a. Hulu		110
	b. Hilir		225	

Keterangan: *) Fasilitas Kerjasama Pembangunan SPBG dengan NEDO

LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Lifting Minyak Bumi

Tahun 2019 Ditjen Migas menargetkan volume lifting minyak bumi berdasarkan RAPBN 2019 sebesar 775 MBOPD. Nilai tersebut adalah yang paling realistis mengingat belum signifikannya penemuan cadangan baru. Berikut upaya-upaya strategis untuk meningkatkan Produksi/Lifting Minyak Bumi tahun 2019:

- Menjalankan program kerja utama hulu migas, dengan tetap memperhatikan keekonomian Wilayah Kerja.
- Pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi minyak bumi dengan metode Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
- Pemantauan produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua
- Melanjutkan monitoring respon tekanan dan produksi dari injeksi air.
- Melakukan monitoring dan evaluasi produksi/lifting migas serta responsive dalam mengatasi kendala operasional lapangan dan permasalahan yang ada.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih lahan, pembebasan lahan, serta keamanan.
- Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan cadangan baru melalui penyempurnaan kebijakan kontrak kerjasama dan kebijakan terkait lainnya.
- Berkoordinasi secara insentif dengan daerah penghasil migas dan KKKS dalam rangka menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KKKS untuk melakukan kegiatan perasinya dan terpenuhinya aspirasi sosial penduduk setempat.
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua

b. Lifting Gas Bumi

Tahun 2019 lifting gas bumi ditargetkan sebesar 1.250 MBOEPD berdasarkan RAPBN 2019. Upaya-upaya strategis untuk meningkatkan optimalisasi Produksi/Lifting Gas Bumi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih lahan, dan pembebasan lahan, serta keamanan
- Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan cadangan baru melalui penyempurnaan kebijakan kontrak kerjasama dan kebijakan terkait lainnya
- Percepatan produksi dari pengembangan lapangan-lapangan baru
- Berkoordinasi secara insentif dengan daerah penghasil migas dan KKKS dalam rangka menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KKKS untuk melakukan kegiatan perasinya dan terpenuhinya aspirasi sosial penduduk setempat
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua

Produksi minyak bumi (termasuk kondensat) pada tahun 2018 berdasarkan RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 800 MBOPD, sedangkan produksi gas bumi tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.200 MBOEPD. Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas tersebut, upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain:

- Penambahan eksplorasi dalam hal mencari cadangan baru.
- Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui infill drilling dan workover.
- Penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
- Percepatan produksi dari pengembangan lapangan-lapangan baru. Monitoring peningkatan produksi dari lapangan Banyu Urip menjadi sebesar 200 ribu MBOPD.
- Percepatan pengembangan struktur idle di PT Pertamina EP.
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

JUMLAH PENANDATANGAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Wilayah Kerja Konvensional

Pada tahun 2019, target Penandatanganan KKS Migas Konvensional sebanyak 6 KKS, sesuai dengan target yang tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 yaitu sebanyak 6 KKS. Dalam rangka mencapai target, Ditjen Migas senantiasa memperbaiki prosedur kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, menyusun regulasi yang dapat menarik minat investasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Khusus untuk peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kegiatan penawaran WK Migas, pada tahun 2016 telah dimulai penerapan Penawaran WK Migas melalui elektronik yaitu e-lelang yang saat ini diterapkan mulai dari Pengumuman s.d. Forum Klarifikasi. Terkait dengan regulasi, saat ini Ditjen Migas merencanakan

untuk revisi Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran WK Migas.

Selain itu, dengan telah diterbitkannya Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas telah melakukan penyederhanaan perizinan menjadi 6 jenis perizinan, salah satunya Izin Survei Umum Migas. Penyederhanaan perizinan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat badan usaha untuk melaksanakan survei umum yang nantinya data yang didapat dari kegiatan survei umum tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi potensi hidrokarbon dalam rangka penyiapan calon wilayah kerja.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2019	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penandatanganan KKS Migas Konvensional	KKS	6	- Konsulda	- Konsulda	- Pembahasan T&C	- Penetapan T&C
			- Pembahasan T&C	- Pembahasan T&C	- Proses lelang	- Pengumuman lelang
			- Pembahasan draft KKS	- Penetapan T&C		- Proses lelang Evaluasi participation document
				- Implementasi draft KKS		
				- Pengumuman lelang		

Table 11. Matriks Rencana Aksi Penandatanganan WK Migas Konvensional

Untuk menunjang pencapaian target Penandatanganan KKS Migas Konvensional Tahun 2019, Ditjen Migas mengusulkan pagu sebesar Rp 1,3 M (pagu definitif) dengan 2 output yaitu Layanan Penawaran Kontrak Kerja Sama Migas dan Penetapan Hasil Lelang WK Migas Konvensional serta WK Migas Konvensional yang ditawarkan.

migas non konvensional akan dilakukan penyempurnaan baik dalam penyiapan wilayah kerja, sistem pelelangan hingga terms & conditions dan bentuk kontrak yang diberlakukan. Sehingga, diharapkan dari upaya tersebut dapat membantu pencapaian target berupa penandatanganan 2 (dua) KKS Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.

b. Wilayah Kerja Non Konvensional

Di tengah iklim investasi di bidang minyak dan gas bumi yang semakin menurun, dalam pengembangan wilayah kerja

Secara umum, Strategi Pencapaian Target Penandatanganan 2 (dua) Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional tahun 2019, antara lain:

1. PENYIAPAN WILAYAH KERJA

a. Meningkatkan pelayanan perizinan Studi Bersama dan Evaluasi Bersama

Mengingat minat investasi pada Shale Hydrocarbon dan Wilayah Kerja GMB yang ada saat ini sebagian besar melalui proses partisipasi Lelang Penawaran Langsung, maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan izin Studi Bersama dan Evaluasi Bersama dalam mengevaluasi dan interpretasi potensi migas non konvensional pada suatu area usulan.

Terus berkurangnya jumlah aplikasi dan permohonan persetujuan Studi Bersama dari calon investor terutama terhadap migas non konvensional harus menjadi pengingat dan motivasi untuk lebih memperbaiki proses perizinan.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut (Permen ESDM No. 36 tahun 2008 dan No. 05 Tahun 2012) telah berjalan dan melibatkan partisipasi stakeholder, sehingga hasil yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi. Sebagai contoh, berkurangnya nominal jaminan Studi Bersama, SOP Pengajuan Studi Bersama yang lebih terkontrol secara waktu dan dapat dilakukan melalui elektronik online, pengutamakan bagi pelaksana Studi Bersama dalam proses Penawaran Langsung, dan proses e-lelang WK Migas.

b. Kerjasama Ditjen Migas, Badan Geologi, Badan Litbang, Pusdatin dan SKK Migas dalam rangka penyiapan Wilayah Kerja Migas :

Dalam penawaran wilayah kerja melalui Lelang Reguler, perlu dilakukan kerja sama Trilateral (Ditjen Migas, Badan Geologi, Badan Litbang) dan didukung oleh Pusdatin dan SKK Migas untuk mengevaluasi potensi migas non konvensional yang areanya bersumber dari :

a. Wilayah Kerja Terminasi

Hingga tengah tahun 2017, terdapat 6 (enam) Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang telah terminasi. Hal ini menjadi peluang bagi investor lain untuk dapat mengelola area tersebut. Namun demikian, perlu bagi Pemerintah untuk meningkatkan data dan hasil interpretasi potensi gas metana batubara pada wilayah tersebut dengan menggunakan data baru hasil

eksplorasi Kontraktor sebelumnya dan penambahan data lain yang diperlukan.

b. Wilayah Kerja Available

Terdapat 11 Wilayah Kerja Available yang terdiri dari 5 Wilayah Kerja Available Gas Metana Batubara dan 6 untuk Shale Hydrocarbon. Ke-11 Wilayah Kerja Available yang pernah ditawarkan melalui lelang ini perlu dilakukan peningkatan mutu data supaya interpretasi potensi yang dihasilkan lebih akurat dan meyakinkan bagi calon investor. Untuk itu, diperlukan keterlibatan Badan Geologi dan Badan Litbang dalam melakukan review dan penambahan data berupa sampling, coring, maupun survei geofisika.

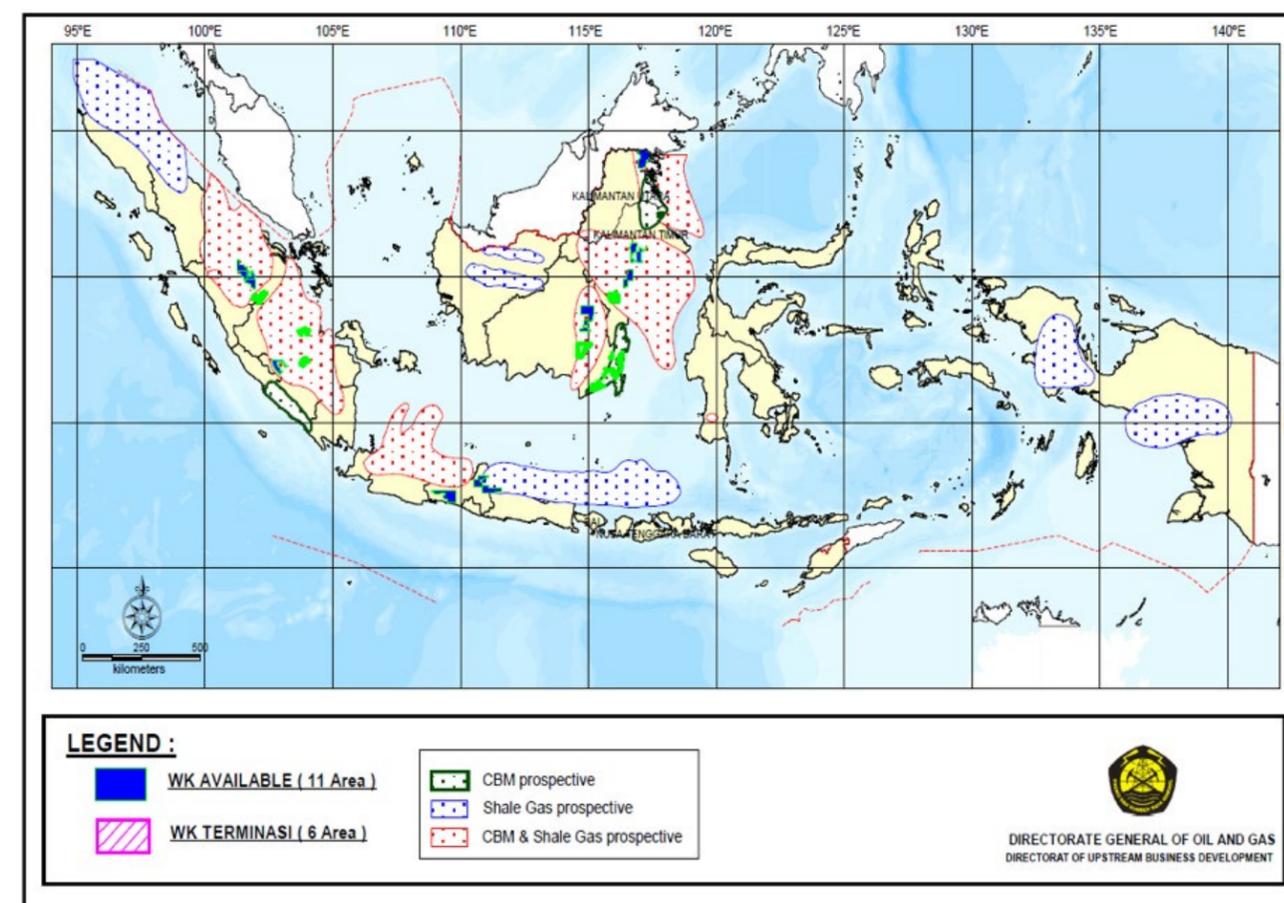
c. Wilayah Terbuka

Saat ini Indonesia memiliki 11 cekungan yang potensi akan kandungan Gas Metana Batubara yang sebagian besar terletak di Sumatera dan Kalimantan (*Advance Resources International, Inc, 2003*). Berdasarkan kajian hasil studi, Indonesia memiliki cadangan Gas Metana Batubara sebesar 453 TCF, dengan kedalaman lapisan antara 500 – 5000 feet. Diperkirakan jumlah Gas Metana Batubara tersebut dapat diambil adalah sebesar 200 TCF.

Beberapa rencana kerja untuk trilateral penyiapan wilayah kerja migas diantaranya

- **Jangka pendek:**
 - o *Optimalisasi WKP Migas yang penambahannya relatif terbatas dan perpanjangan WK Terminasi*
 - o *Optimalisasi kegiatan eksplorasi di WKP Eksplorasi dan Eksploitasi yang nilai investasinya terus menurun*
- **Jangka menengah:**
 - o *Melakukan riset keadaan cekungan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan:*
 - *Sistem petroleum yang berkaitan dengan gunung api*
 - *Migas Non Konvensional pada Cekungan Tersier Indonesia*
 - *Potensi gas biogenik di Indonesia*
 - *Sistem petroleum Pra-Tersier*
- *Overlook potential pada Cekungan Matang*

Prospect ranking, untuk menajamkan prioritas eksplorasi, dalam rangka mengubah 222,85 BBOE resources menjadi proven reserves



Gambar 4. Sebaran Wilayah Kerja Available dan Terminasi, serta Cekungan Gas Metana Batubara dan Shale Hydrocarbon Indonesia

Diharapkan dari kerja sama ini, proses penyiapan wilayah kerja yang berada di wilayah terbuka semakin meningkat dan diminati.

2. PENAWARAN WILAYAH KERJA

1. Meningkatkan promosi investasi industri hulu Migas Non Konvensional Penggunaan multi media dalam kegiatan promosi

Promosi wilayah kerja yang dilakukan dalam bentuk pameran sebagai juru penerang/ presenter dalam menjelaskan mengenai penawaran wilayah kerja migas non konvensional, peningkatan promosi juga dilakukan melalui penyediaan media cetak maupun elektronik antara lain booklet, poster, leaflet, brosur, dan CD film promosi.



Gambar 5. Contoh buku, leaflet dan VCD Promosi

2. Peningkatan layanan Penawaran Wilayah Kerja melalui Sistem Lelang Elektronik Online

Untuk memperoleh calon investor yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan perusahaan migas non konvensional, maka perlu dilakukan penyebaran informasi secara masif dan terbuka mengenai penawaran wilayah kerja baru yang akan ditawarkan. Untuk itu, proses penawaran wilayah kerja berikutnya akan dilakukan secara elektronik seperti halnya pada e-procurement. Informasi lelang wilayah kerja dapat diakses

oleh siapapun dan dimanapun melalui sebuah situs. Pengambilan Dokumen Lelang berupa e-document juga dapat diunduh setelah terkonfirmasi pembayaran atas pembelian dokumen.

Diharapkan pelaksanaan lelang dengan sistem elektronik tersebut memberikan pelayanan kepada calon investor secara lebih berkualitas dan dapat meningkatkan jumlah partisipasi lelang serta dalam upaya transparansi untuk menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.



Gambar 6. Alur Proses E-Lelang Blok Migas

CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

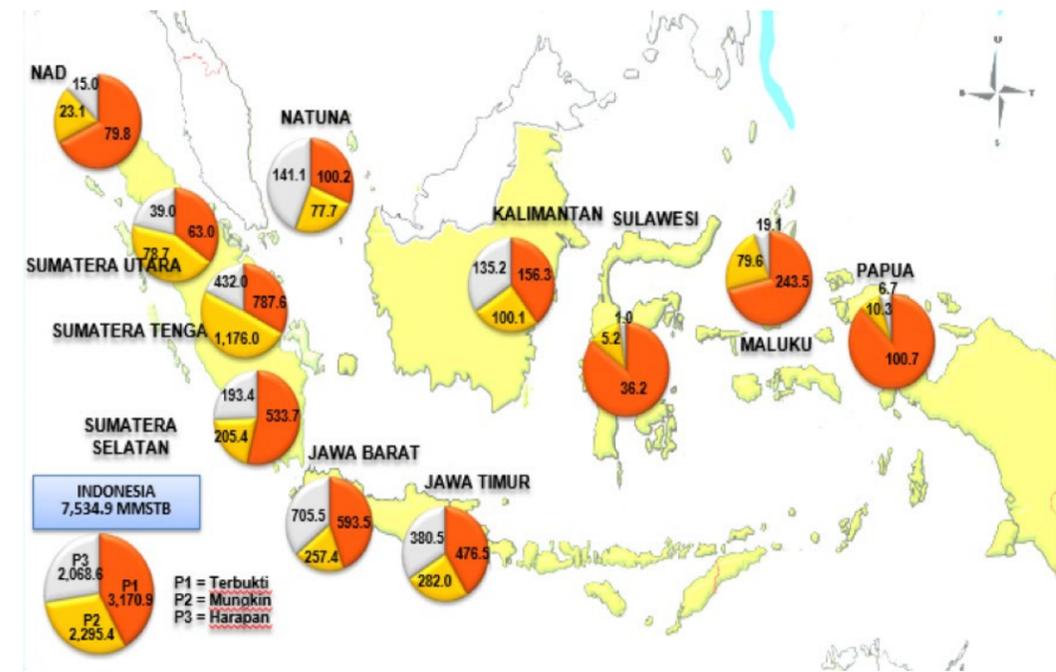
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Target cadangan minyak dan gas bumi tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Penurunan target tersebut dengan mengasumsikan bahwa pada tahun 2019 tidak ditemukan cadangan besar yang dapat menggantikan cadangan yang telah diproduksi (Reserves Replacement Ratio (R3) < 1). Idealnya R3 ≥ 1 dimana setiap produksi 1 barel harus diimbangi dengan penemuan cadangan dari eksplorasi ≥ 1 barel. Target pencapaian cadangan minyak bumi Tahun 2019 sebesar 5.747 MMSTB sedangkan gas bumi Tahun 2019 sebesar 142 TSCF. Dalam rangka pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi tersebut, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain adalah:

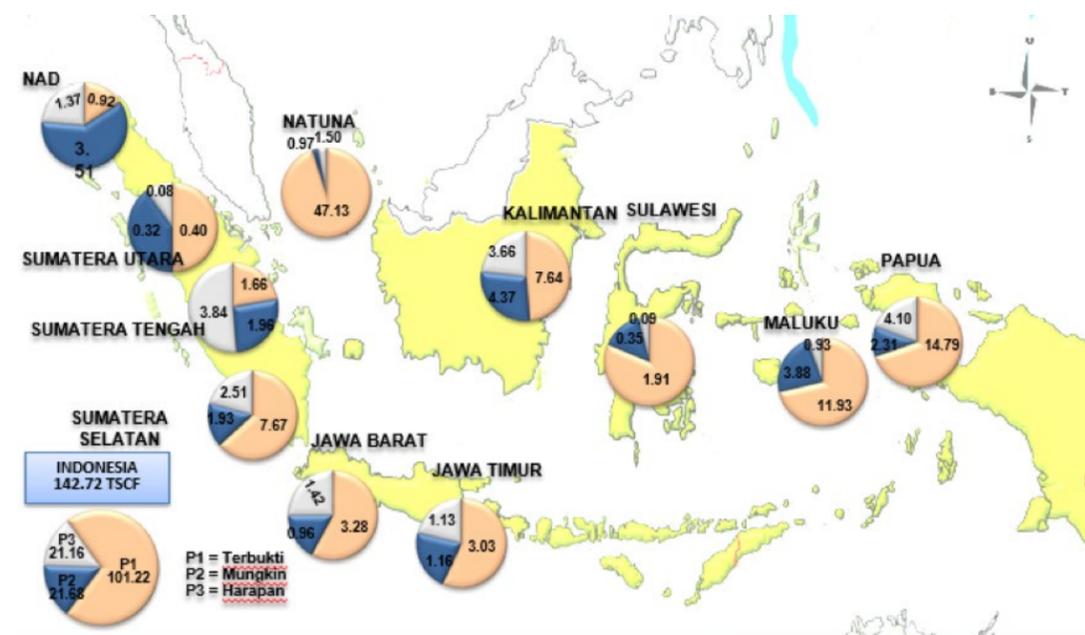
1. Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (remaining reserves);

2. Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan harapan (Possible) ke mungkin (Probable) maupun dari cadangan mungkin (Probable) ke terbukti (Proven);
3. Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun reassessment cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.

Gambar 15 dan Gambar 16 menunjukkan status terbaru jumlah cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.



Gambar 7. Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2017)



Gambar 8. Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2017)

Evaluasi cadangan minyak bumi perlu dilakukan dalam rangka perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga

diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi.

PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Persentase Alokasi Gas Domestik

Pemanfaatan gas bumi domestik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang juga mengamatkan dan memberi payung hukum atas perubahan paradigma dimana “energi tidak lagi berperan sebagai komoditi tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat a serta Pasal 9. Peraturan dimaksud memberi landasan Pemerintah dalam mengupayakan agar sumber daya energi nasional yang tersedia dimanfaatkan sebagai faktor produksi (input) dalam pembangunan industri nasional dan tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan paradigma lama yang menjadikan gas bumi sebagai komoditi untuk menghasilkan penerimaan bagi Pemerintah. Mengingat pentingnya pencapaian target energy mix dan target pemanfaatan sumber daya energi sebagai modal pembangunan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku instansi pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan subsektor migas, menargetkan persentase alokasi gas bumi sebesar 64% pada tahun 2019 sebagai indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Komitmen pemerintah untuk mengalokasikan gas bumi nasional dalam memenuhi kebutuhan energi domestik kian diperkuat dengan adanya beberapa peraturan perundangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM nomor 06 tahun 2016 diatur bahwa alokasi pemenuhan kebutuhan energi domestik dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang terdiri dari:

1. Pemanfaatan untuk program Pemerintah seperti Penyediaan Gas Bumi untuk Transportasi, Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Rumah Tangga, dan Pelanggan Kecil;
2. Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional;
3. Industri pupuk;
4. Industri berbasis gas bumi;
5. Penyediaan gas bumi untuk tenaga listrik;
6. Industri yang ber bahan bakar gas bumi.

b. Fasilitas Pembangunan FSRU

Untuk mensukseskan diversifikasi energi menggunakan gas bumi, pemerintah mendorong pembangunan sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan gas bumi baik dengan pembiayaan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Sampai dengan tahun 2019 pemerintah menargetkan terbangunnya LNG receiving terminal dan liquefaction sebanyak 7 unit. Tada tahun 2019 akan dibangun LNG Masela dan LNG Tangguh Train 3. Dalam rangka mencapai sasaran kinerja tersebut Pemerintah berupaya:

1. Memastikan bahwa kebutuhan gas domestik terjamin;
2. Penyerapan gas oleh end-user dapat terpenuhi minimal 85%;
3. Mengevaluasi harga gas yang dapat diterima oleh produsen gas dan end-user;
4. Membuat perencanaan pembangunan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi melalui Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional;
5. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur gas bumi melalui penyertaan modal negara;
6. Menetapkan peraturan yang mengatur pengusaha gas di sektor hilir.

VOLUME BBM BERSUBSIDI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak (pasal 8 ayat 2 UU 22/2001 tentang Migas). Salah satu tantangan dalam menyusun strategi dan program kebijakan pemberian subsidi bahan bakar adalah persoalan ketepatan sasaran dan keadilan. Sejak lama bangsa Indonesia terlena dengan mitos bahwa negeri ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah misalnya minyak bumi, sehingga menjadikan masyarakat pengguna BBM terbiasa menikmati BBM dengan harga yang murah, padahal harga tersebut

merupakan harga yang telah disubsidi. Namun, kondisi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan kesempatan kepada rakyat kurang mampu untuk mendapatkan harga BBM yang terjangkau. Bahkan kenyataannya masyarakat yang kurang mampu yang umumnya tinggal di pedesaan dan jauh dari Penyalur BBM membeli BBM dengan harga yang jauh di atas harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah. Tahun 2019 berdasarkan rapat dengan DPR RI, volume BBM bersubsidi sejumlah 15,11 Juta KL.b.

KAPASITAS KILANG BBM

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Produksi BBM dari Kilang dalam Negeri

Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri secara langsung menuntut adanya ketersediaan fasilitas pengolahan migas yang cukup memadai, baik dari segi kapasitas maupun produksi. Tahun 2018 menargetkan produksi BBM dari kilang dalam negeri sebesar 39 Juta KL, prognosa realisasi sampai dengan TW IV adalah 42.5 Juta KL. Tahun 2019 angka target meningkat 4 Juta KL menjadi 42 Juta KL. Peningkatan realisasi produksi dari tahun 2015 ke tahun 2016 secara signifikan disebabkan dengan beroperasinya RFCC RU IV Cilacap PT Pertamina (Persero) pada tanggal 1 Oktober 2015. Dengan beroperasinya unit ini, maka terjadi kondisi:

- Tidak ada lagi impor HOMC (High Octane Mogas Component), dimana HOMC merupakan komponen

- blending Gasoline/Premium. HOMC mempunyai ON=92; Impor Premium ke TBBM (Terminal BBM) Lomanis 2 x 200 MB di stop/tidak diperlukan dan selanjutnya kebutuhan Premium tersebut dapat disupply langsung dari RU IV Cilacap;
- Injeksi/import LPG via kapal sebanyak 7 x 2500 MT per bulan dapat dikurangi 6 (enam call kapal), saat ini hanya dibutuhkan satu kali injeksi kapal saja (1 x 2500 MT) per bulan; dan
- RU IV dapat memproduksi Pertamina (ON=92) dan Propylene (kedua produk ini merupakan produk baru dari kilang RU IV Cilacap).

Sehingga kondisi sebelum dan setelah beroperasinya unit RFCC dapat ditampilkan sebagai berikut:

Table 12. Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri

	Pra RFCC (MBCD)	Pasca RFCC (MBCD)	Delta (MBCD)
Intake			
HOMC	12.23	0.00	-12.23
Produk			
Premium	55.14	85.21	30.07
Pertamax	0.00	5.66	5.66
LPG	3.09	13.59	10.50
Propylene	0.00	0.92	0.92
MFO	26.47	21.84	-4.62

Produksi BBM sebagaimana ditampilkan pada tabel produksi dari kilang dalam negeri hanya mampu memenuhi kurang lebih 50% dari kebutuhan total domestik, sehingga dilakukan impor BBM untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Hal ini disebabkan dengan tidak adanya penambahan kapasitas kilang dan revitalisasi kilang existing. Dengan

kondisi tersebut, Pemerintah mengambil langkah dengan menugaskan PT Pertamina (Persero) melakukan RDMP and NGRR Project. Pemerintah menerbitkan Perpres 146/2015 sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun kilang-kilang yang masuk dalam project dimaksud adalah terlihat pada Tabel berikut:

Table 12. Kilang-Kilang yang masuk dalam Proyek

Project	Kapasitas (MBCD)	Onstream Produksi	Status
RDMP RU V Balikpapan	360 (sebelumnya 260)	Fase 1: 2021 Fase 2: 2025	- sedang berlangsung proses EPC bidding. Target EPC award Desember 2018; - Early works tahap 1 sedang berjalan, Early tahap 2 dalam proses procurement
GRR Jatim (JV Rosneft)	300	2024	- Kajian opsi lahan alternatif sedang dilakukan - Pengadaan General Engineering Design
RDMP RU IV Cilacap (JV Aramco)	400 (sebelumnya 348)	2024	- Proses pengadaan lahan tambahan
GRR Bontang (JV OOG- Cosmo Oil)	300	2024/2025	- Tahap finalisasi Frame Work Agreement (FWA)

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri terkait dengan penugasan untuk membangun dan mengupgrade kilang sebagai berikut:

- Kepmen ESDM Nomor 807 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur;
- Kepmen ESDM Nomor 7935 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

- Kepmen ESDM Nomor 1001 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; dan
- Kepmen ESDM Nomor 1000 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

b. Kapasitas Kilang BBM

Table 13. Target dan Realisasi Kapasitas Kilang Terpasang

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Kapasitas (MBCD)	1169	1169	1169	1169	1169

Kapasitas kilang yang disampaikan dalam Tabel 2 diatas merupakan target dan realisasi yang sesuai dengan kapasitas kilang terpasang dan tidak ada penambahan kapasitas kilang. Rincian kapasitas kilang dalam negeri tersebut sebagai berikut (satuan MBCD):

- PT Pertamina (Persero) sebesar 1047,3;
- Kilang Pusdiklat Migas Cepu sebesar 3,8;

- PT TPPI sebesar 100; dan
- PT TWU sebesar 18.

Akan tetapi pada RENSTRA 2015-2019, di tahun 2019 kapasitas kilang sebesar 1269 MBCD karena diperkirakan RDMP Balikpapan akan on stream pada tahun 2019. Akan tetapi, sampai saat ini untuk proyek RDMP kilang Balikpapan masih pada tahap pembangunan dan belum bisa on stream seperti yang diperkirakan.

KAPASITAS KILANG LPG

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Salah satu kilang pengolahan gas di Indonesia adalah pengolahan LPG. LPG dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. Kapasitas kilang LPG diperoleh dari kapasitas kilang minyak PT Pertamina (Persero), kapasitas kilang LPG pola hulu, dan kapasitas kilang LPG pola hilir. Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 realisasi kapasitas terpasang kilang LPG mengalami kenaikan dari 4,63 Juta Ton Per Tahun menjadi 4,74 Juta Ton Per Tahun. Namun demikian dari total

kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,74 Juta Ton Per Tahun, kapasitas kilang LPG yang beroperasi hanya sebesar 3,84 Juta Ton Per Tahun karena ada beberapa kilang LPG pola hulu dan pola hilir yang sudah tidak beroperasi. Tahun 2019 target yang dihasilkan dari kapasitas terpasang LPG adalah 4,74 Juta Ton Per Tahun.

Untuk kapasitas kilang LPG sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (Ton/hari)	Kapasitas (MTPA)
Kilang Minyak			
PT. Pertamina (Persero)	Dumai	185	68
PT. Pertamina (Persero)	Plaju	360	131
PT. Pertamina (Persero)	Cilacap	871	318
PT. Pertamina (Persero)	Balikpapan	250	91
PT. Pertamina (Persero)	Balongan	1500	548
Sub Total Kilang Minyak			1.156
Kilang Gas Skema Hulu			
PT. Badak NGL	Bontang	2740	1.000
PT. Chevron *	T. Santan	247	90
PT. Petrogas *	Basin	38	14
PT. Petrochina	Jabung	1644	600
PT. Conoco Phillips *	Belanak	1439	525
PT. Saka Indonesia	Ujung Pangkah	310	113
Sub Total Kilang Gas Skema Hulu			2.342
Kilang Gas Skema Hilir			
PT. Pertamina (Persero) *	P. Brandan	120	44
PT. Maruta Bumi Prima *	Langkat	46,57	17
PT. Medco LPG Kaji *	Kaji	200	73
PT. Pertamina (Persero)	Mundu	101	37
PT. Titis Sampurna	Prabumulih	200	73
PT. Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	19	7
PT. Bina Bangun Wibawa Mukti	Tambun	151	55
PT. Surya Esa Perkasa	Lembak	225	82
PT. Yudhistira Haka Perkasa *	Cilamaya	120	44
PT. Wahana Insannugraha *	Cemara	102	37
PT. Media Karya Sentosa Phase I *	Gresik	160	58
PT. Tuban LPG Indonesia	Tuban	480	175
PT. Yudistira Energi	Pondok Tengah	160	58
PT. Media Karya Sentosa Phase II	Gresik	230	84
PT. Gasuma Federal Indonesia	Tuban	71	26
PT. Pertasmtan Gas	Sungai Gerong	710	259
PT. Sumber Daya Kelola	Losarang	11	3,8
PT. Arsynergy Resources	Gresik	300	109,5
Sub Total Kilang Gas Skema Hilir			1.242,3
Grand Total Kapasitas LPG			4.740,3

Table 14. Kapasitas Kilang LPG sampai dengan Tahun 2018

VOLUME LPG BERSUBSIDI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berencana menerapkan distribusi tertutup untuk elpiji 3 kilogram (kg) agar pemberian subsidi tepat sasaran yaitu pada masyarakat tidak mampu dengan tujuan pasokan lebih terjamin untuk kalangan tersebut. Tahun 2019 Ditjen Migas menargetkan volume LPG bersubsidi sebesar 6,978 Juta MT. Besaran volume

LPG bersubsidi dipengaruhi oleh besaran wilayah yang telah terkonversi serta jumlah penerima paket perdana. Salah satu langkah pengendalian volume LPG bersubsidi adalah dengan meminta badan usaha pelaksana PSO untuk memberikan kuota kepada tiap-tiap SPBE di daerah dengan menimbang pemberian kuota tersebut tidak menimbulkan efek negatif seperti kenaikan harga.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga

Target kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga pada tahun 2019 sebanyak 78.216 SR di 18 lokasi. Dalam rangka pencapaian target terbangunnya Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di wilayah-wilayah tersebut maka direncanakan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis meliputi :

1. Pembentukan Panitia Lelang dan P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) Pembangunan Jargas di awal Tahun Anggaran berjalan agar proses pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jargas dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin ditentukan.
2. Melakukan Rapat Koordinasi intensif terkait pembahasan segala macam jenis perizinan pembangunan Jargas dengan instansi terkait seperti Pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI), Jasa Marga dan instansi lain terkait.
3. Melakukan Koordinasi insentif dengan PEMDA terkait penggunaan fasilitas umum untuk penggelaran pipa pada jalan umum, penyediaan lahan untuk MR/S dan RS, pekerjaan penggalian dan rehabilitasi pasca penggalian.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Pemda yang

akan menerima manfaat/dampak Pembangunan Jargas terkait pemberian pemahaman dan meredam gejala yang kemungkinan ada di masyarakat.

5. Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi kepada kontraktor pelaksana konstruksi Jargas dan konsultan pengawas dengan berkoordinasi bersama Pemda setempat terhadap setiap kemajuan proyek dan penyelesaian setiap kendala yang mungkin timbul agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat biaya.
6. Melakukan inventarisasi asset barang milik negara pada program jargas yang selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk dimintakan persetujuan atas skema pengelolaan asset.
7. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan terkait penunjukkan BUMN untuk mengoperasikan Jargas yang telah dibangun.
8. Melakukan koordinasi dengan Pemda, SKK Migas, BPH Migas, Pemasok Gas Bumi dan BUMN yang ditunjuk untuk mengoperasikan Jargas mengenai harga gas bumi yang akan ditetapkan Pemerintah di sisi Hulu dan Hilir.

b. Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Nelayan Kecil

Gas bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber energi dan bahan baku, penerimaan Negara, serta juga dapat menciptakan efek berantai untuk peningkatan kapasitas nasional. Peranan Gas Bumi sebagai salah satu sumber energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan Gas Bumi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu.

Bahan bakar yang umum digunakan di Indonesia pada kapal-kapal laut adalah bahan bakar minyak. Nelayan sering mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pasokannya. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah berencana untuk menggunakan bahan bakar gas sebagai alternatif energi

dalam bidang kelautan dengan asumsi bahan bakar gas merupakan energi yang relatif lebih bersih dan lebih murah dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak.

Dalam rangka program konversi BBM ke BBG pada kapal perikanan, Balai Besar Penangkapan Ikan telah melaksanakan kegiatan pengujian penggunaan LPG pada Kapal Perikanan Skala Kecil (≤ 5 GT). Dari hasil pengujian, diketahui bahwa penggunaan LPG untuk kapal perikanan terbukti mampu mengurangi konsumsi BBM, baik BBM jenis bensin maupun solar. Pada motor bensin dapat menggantikan BBM 100%, sedangkan pada motor diesel dapat menggantikan BBM sekitar 69%.

Berikut perhitungan efisiensi biaya penggunaan LPG dibandingkan dengan BBM (bensin) berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Lemigas :

Gambar 9. Perhitungan Konversi Bahan Bakar Bensin ke LPG untuk Nelayan

PERHITUNGAN KONVERSI BAHAN BAKAR BENJIN KE LPG UNTUK NELAYAN								
KONVERSI BAHAN BAKAR BENJIN KE LPG BENSIN DAPAT DIGANTIKAN DENGAN LPG 100%								
1. Asumsi: Harga Bensin Rp.6450/Liter; Harga LPG (Subsidi) Rp.17000/3 Kg								
Penggunaan Bahan Bakar Bensin utk Kebutuhan Melaut (Kapal Perahu Bermotor < 5 GT dengan mesin 13 HP selama 10 jam (one day fishing))	Penggunaan Bensin			Penggunaan LPG			SELISIH	
	Bensin (Liter)	Pengeluaran Nelayan		LPG (3 kg)	Pengeluaran Nelayan		Pengeluaran Nelayan	
	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)
21	135,450	49,439,250	3	51,000	18,615,000	84,450	30,824,250	
2. Asumsi: Harga Bensin Rp.6450/Liter; Harga LPG (NON-Subsidi) Rp.34000/3 Kg								
Penggunaan Bahan Bakar Bensin utk Kebutuhan Melaut (Kapal Perahu Bermotor < 5 GT dengan mesin 13 HP selama 10 jam (one day fishing))	Penggunaan Bensin			Penggunaan LPG			SELISIH	
	Bensin (Liter)	Pengeluaran Nelayan		LPG (3 kg)	Pengeluaran Nelayan		Pengeluaran Nelayan	
	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)
21	135,450	49,439,250	3	102,000	37,230,000	33,450	12,209,250	

Pada Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan TA 2019, rencananya akan dibagikan sebanyak 13.305 paket konversi BBM ke BBG.

JUMLAH REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP TARGET APBN

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM tiap tahunnya memberikan kontribusi setidaknya 30% terhadap penerimaan negara. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2019 adalah meningkatnya penerimaan subsektor migas dalam pembangunan nasional. Peningkatan penerimaan subsektor migas sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain:

- a. Volume lifting minyak bumi;
- b. Volume lifting gas bumi;
- c. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP);
- d. Kurs Rupiah;
- e. Cost recovery;

Sesuai dengan program kerja tahun 2019 dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satu tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang sumber daya alam subsektor minyak dan gas bumi. Terdapat 4 (empat) parameter yang mempengaruhi besar dan kecilnya penerimaan negara SDA migas, yaitu antara lain adalah:

1. Lifting/Produksi minyak dan gas bumi

Untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang subsektor minyak dan gas bumi, tentunya produksi/lifting minyak dan gas bumi harus ditingkatkan. Berbagai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi produksi minyak dengan menggunakan metode Enhanced Oil Recovery (EOR), melakukan upaya-upaya preventive/predictive maintenance untuk mengurangi unplanned shutdown, efisiensi operasi dan optimasi fasilitas produksi perlu dilakukan agar

target lifting dan penerimaan negara dapat dicapai dengan baik.

2. Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah memiliki pengaruh terhadap penerimaan negara, baik penerimaan SDA migas dan PPh migas, maupun PNBP lainnya yang berasal dari pendapatan minyak mentah DMO (Domestic Market Obligation). Meningkatnya harga minyak mentah akan mengakibatkan kenaikan pendapatan/penerimaan negara dari production sharing contract migas melalui PNBP (*dengan syarat kondisi: jika harga jual minyak mentah DMO lebih besar dibandingkan harga beli pemerintah atau harga minyak mentah DMO milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibeli oleh pemerintah).

3. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terkait erat dengan asumsi besaran nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, salah satunya seperti penerimaan serta impor SDA migas.

4. Cost Recovery

Sistem kontrak antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah PSC (Production Sharing Contract) dimana dalam skema PSC terdapat Cost recovery atau biaya produksi yang dikembalikan kepada kontraktor sesuai PP 79 tahun 2010.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya asumsi/parameter dalam RAPBN 2019 maka target penerimaan negara dari SDA migas sebesar Rp 234,73 Triliun, dengan rincian asumsi/parameter berikut:

1. Lifting minyak bumi sebesar 775 MBOPD
2. Lifting gas bumi sebesar 1.250 MBOEPD
3. Harga ICP sebesar 70 US\$/Barrel

Upaya-upaya strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam migas tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi/lifting migas
2. Harga Minyak Mentah Indonesia

- Melakukan evaluasi kinerja Formula Harga Minyak Mentah Utama Indonesia
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan harga minyak mentah Indonesia setiap bulan

- Melakukan evaluasi formula harga minyak mentah Indonesia lainnya dengan memperhatikan kontinuitas produksi, kestabilan kualitas, ketersediaan infrastruktur dan/ atau kestabilan pasar atas suatu jenis minyak mentah.

3. Harga Gas Bumi

Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan melakukan renegosiasi harga gas bumi untuk konsumen dalam negeri dalam rangka mendukung peningkatan keekonomian lapangan dan kontribusi produksi gas bumi.

JUMLAH RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI SESUAI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang minyak dan gas bumi, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dibidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum serta informasi hukum. Paradigma penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi yang menyatakan bahwa pengusahaannya memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sekarang perlahan mulai berubah.

Perubahan paradigma tersebut adalah bahwa perusahaan minyak dan gas bumi diarahkan untuk

mendukung ketahanan energi nasional. Pengembangan perusahaan minyak dan gas bumi non konvensional (meliputi Gas Metana Batubara, Batubara Tercairkan, Tight Sand Gas, Gas Shale serta Hidrokarbon lainnya), dan perusahaan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan, serta upaya untuk meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi dilaksanakan menjamin ketahanan energi nasional.

Untuk mendukung ini diperlukan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir paradigma baru penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, yang juga selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu juga dengan perkembangan perusahaan minyak dan gas bumi yang makin beragam bentuknya diperlukan juga berbagai pertimbangan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sehingga tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Tahun 2019 target yang akan di capai dalam rangka mendukung kegiatan di subsektor migas adalah sebanyak 15 rancangan.

INVESTASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Pada tahun 2019 diperkirakan investasi migas sebesar 13,425 Miliar USD nilai ini berasal dari investasi hulu sebesar 13.425 Juta USD dan investasi hilir sebesar 998 Juta USD. Upaya yang kami laksanakan dalam peningkatan investasi migas antara lain Pelaksanaan promosi investasi migas di beberapa negara,

perlindungan para investor yang telah berinvestasi di dalam negeri dengan cara mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan pelayanan dengan penyederhanaan perizinan migas. Sejumlah perizinan telah dilakukan secara online untuk memudahkan badan usaha mengajukan perizinan.



Grafik 20. Prognosa Investasi Subsektor Migas Tahun 2019

JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KETEKNIKAN DENGAN BAIK

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Dalam melaksanakan kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir disamping harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, harus pula memperhatikan kaidah keteknikan yang baik. Kegiatan usaha migas memang menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat, namun tidak dapat dipungkiri dari kegiatan migas dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang fatal ataupun kerusakan pada lingkungan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

UU migas mewajibkan BU/BUT (perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan migas) untuk menerapkan kaidah keteknikan yang baik. Untuk menjamin kegiatan usaha migas dapat beroperasi dengan optimal dan mewujudkan instalasi migas yang efektif, efisien, aman, andal dan akrab lingkungan, maka kaidah keteknikan yang baik harus diterapkan.

Pengawasan Keteknikan yang baik adalah dengan penerapan metoda rekayasa keteknikan yang telah terbukti, praktek-praktek, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada. Dalam melakukan pengawasan keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi dapat diukur dengan:

- 1) Dampak terhadap sumber daya dan lingkungan seperti program inovatif penurunan emisi melalui manajemen yang baik, substitusi bahan berbahaya, perawatan peralatan yang lebih baik
- 2) Pencegahan terbuangnya sumber daya, antara lain pemanfaatan gas suar bakar
- 3) Identifikasi risiko, mitigasi risiko dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak
- 4) Pemenuhan kewajiban pelaporan; kecelakaan, tumpahan minyak, pemakaian bahan kimia dan produksi limbah dan baku mutu emisi dan limbah.

JUMLAH PERUSAHAAN HULU DAN HILIR MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN FATAL

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

a. Hulu

Dalam rangka memenuhi target kinerja zero accident (tidak ada fatality dan kecelakaan berat) pada kegiatan usaha hulu migas pada tahun 2019, maka Ditjen Migas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Ditjen Minyak dan Gas bumi c.q Subdit Keselamatan Hulu Migas menargetkan adanya 110 BU/BUT pada operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada tahun 2019 yang tidak terjadi kecelakaan kerja berat dan fatal serta unplanned shutdown.

Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat.
3. Menyusun pedoman atau prosedur kerja pemeriksaan teknis peralatan dan instalasi.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan kepada BU.
5. Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para stakeholder migas.

Pelaksanaan pembinaan terhadap stakeholder yang melakukan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi juga dilakukan mengingat pentingnya kegiatan migas bagi kesejahteraan rakyat, dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut jika tidak dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik. Beberapa bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah menyelenggarakan kegiatan berupa workshop, bimbingan teknis dan forum komunikasi.

Dengan adanya pengawasan keteknikan yang baik ini menghasilkan industri migas yang efektif, efisien, aman, andal dan akrab lingkungan sehingga berdampak pada meningkatnya produksi minyak dan gas bumi nasional yang berkelanjutan. Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka penerapan kaidah keteknikan yang baik pada industri Hulu, Hilir dan Usaha Penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Tahun 2019 dalam hal jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik menargetkan sejumlah 30 perusahaan.

b. Hilir

Kegiatan hilir migas terdiri dari pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga migas. Kegiatan migas merupakan kegiatan yang sangat terkait erat dengan kelangsungan perekonomian suatu daerah, kota ataupun Negara. Karena itu maka diperlukan pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan usaha migas. Undang-Undang No. 22 tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi yang dibantu oleh para Inspektur Migas. Mengingat kompleksnya dan semakin berkembangnya kegiatan usaha migas maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat beroperasi dengan aman, handal, efektif, efisien dan aman terhadap lingkungan. Dalam melaksanakan pemeriksaan audit diperlukan suatu pedoman audit Sistem Manajemen Keselamatan Lingkungan. Tujuan dari perumusan pedoman ini adalah tercapainya kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang aman, selamat, dan handal. Indikator dari kegiatan ini adalah Kontraktor atau Badan Usaha yang memiliki SMKMS dengan Rating dengan Nilai di atas 80. Pelaksanaan pembinaan terhadap stakeholder yang melakukan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi juga dilakukan mengingat pentingnya kegiatan migas bagi kesejahteraan rakyat, dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut jika tidak dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik. Sehingga tahun 2019 menargetkan jumlah perusahaan migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan kegagalan operasi (unplanned Shutdown) fatal sebanyak 225 perusahaan.

Bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha (BU) pada kegiatan usaha migas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yaitu melalui:

- a. Kegiatan pemeriksaan teknis dan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi dan instrumentasi;
- b. Pembinaan dan pengawasan teknis alat ukur migas;
- c. Penyusunan pedoman (Keselamatan hilir migas);
- d. Pengawasan sistem manajemen pengamanan kegiatan usaha migas;
- e. Pembentukan dan membantu pelaksanaan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM); dan
- f. Pembinaan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas.

BAB 4

Anggaran Ditjen Migas Tahun 2019

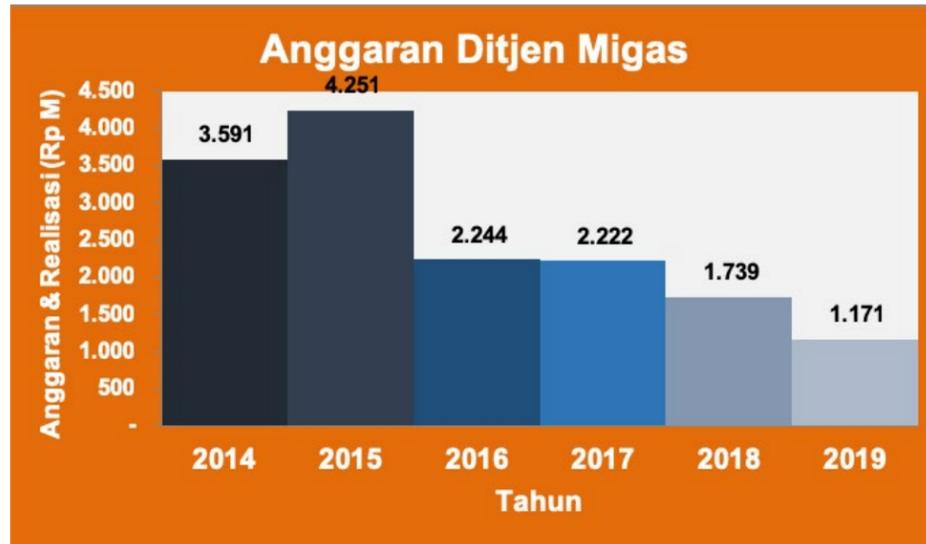


ANGGARAN DITJEN MINYAK

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Dalam rangka pencapaian bertujuan negara tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, dalam Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pendekatan pengelolaan anggaran yang saat ini berlaku adalah pengelolaan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget) yang berfokus pada sasaran, outcomes, dan output sehingga dapat memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensi kegiatan.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini akan memberikan informasi kinerja atas program/kegiatan pada suatu K/L serta dampaknya bagi masyarakat luas. Informasi kinerja yang dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan program/kegiatan tetapi keterkaitan hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up). Dalam rangka melakukan penyusunan anggaran di tahun 2019, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggunakan pendekatan penganggaran dengan kebijakan money follows program. Alokasi anggaran program/kegiatan diutamakan untuk yang memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, dengan tetap memperhatikan target-target sub sektor minyak dan gas bumi yang telah tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019. Oleh karena itu, saat ini Ditjen Migas mengalokasikan anggaran pada belanja reguler dan infrastruktur dengan total pagu tiap tahun sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:



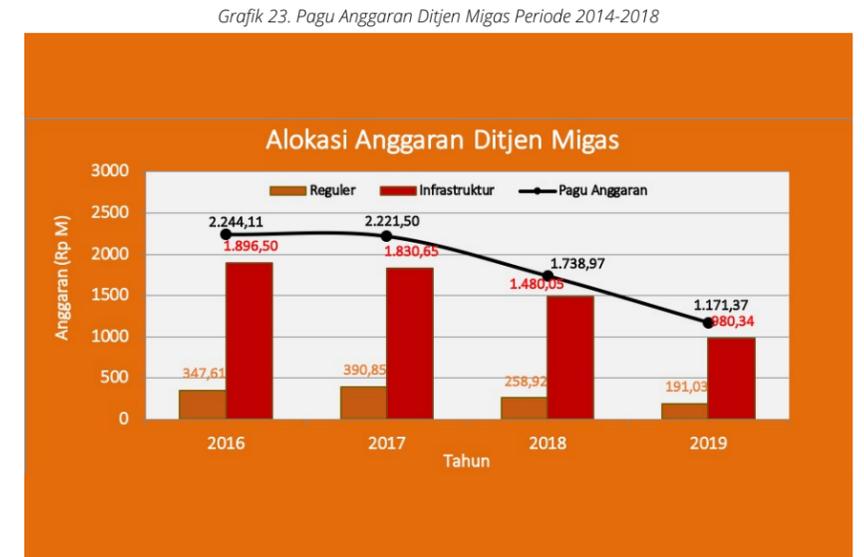
Grafik 21. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018

Untuk realisasi anggaran tiap tahun sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Grafik 22. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018

Sampai dengan akhir Desember realisasi diproyeksikan dapat mencapai lebih dari 90%. Tahun 2019 alokasi anggaran Ditjen Migas sebesar Rp 1.171.369.684,00 yang di peruntukan untuk belanja infrastruktur sebesar Rp 973, 46 M dan belanja reguler sebesar Rp 197,91 M sebagaimana terlihat pada grafik 23.



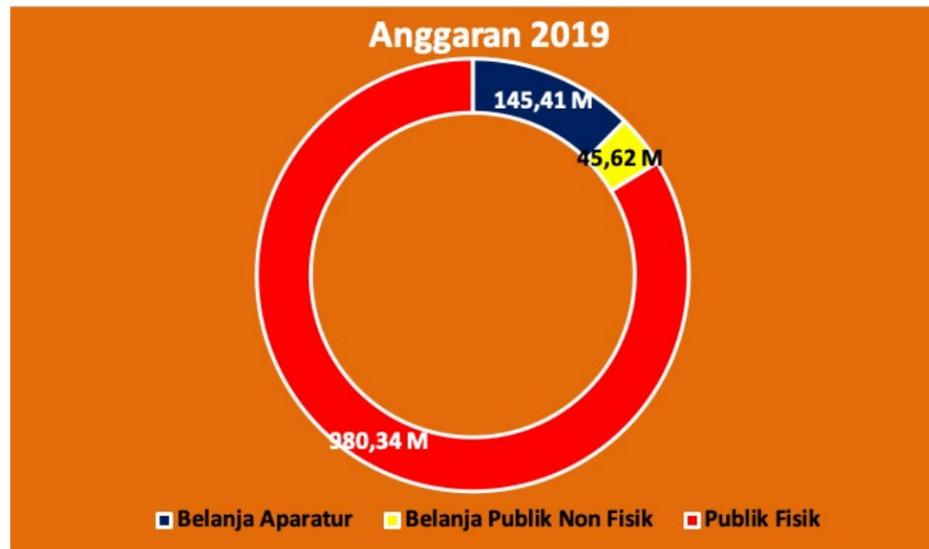
Grafik 23. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018

Alokasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2019 terbagi berdasarkan penerima manfaatnya yaitu

1. Belanja Aparatur : Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pembayaran gaji dan Operasional perkantoran
2. Belanja Publik non fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/ stakeholder, antara lain: Pengawasan, Rekonsiliasi data, dan Penyusunan peraturan perundangan

3. Belanja Publik fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: Pembangunan Jargas, Pembagian Konverter Kit Nelayan, Konversi Minyak Tanah ke LPG, Riviu FEED/DEDC Jargas, dan Layanan Infrastruktur

Untuk masing-masing alokasi dapat dilihat pada grafik 24 dengan besaran belanja aparatur Rp 145,41 M, Belanja Publik Non Fisik Rp 45,62 M, dan Belanja Publik Fisik sebesar RP 980,34 M



Grafik 24. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018

Tabel 11. Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2

Anggaran 2019		
No	Unit	Jumlah (Rp Ribu)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	6.314.218,00
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	9.615.640,00
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME)	6.052.819,00
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	5.636.222,00
5	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	120.134.461,00
6	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur DMI)	980.341.118,00
7	Badan Pengatur Migas Aceh (BPMA)	43.275.206,00
Total		1.171.369.684,00

BAB 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DITJEN MIGAS TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Pencapaian misi/sasaran K/L (impact) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (outcome) yang ada di dalam K/L, dan Pencapaian kinerja program (outcome) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (output). Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan alat

ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DITJEN MIGAS

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Tabel 12. IKK Direktorat Pembinaan Program

Direktorat Pembinaan Program Migas (DMB)					6.314.218,00
Sasaran	No	IKK	Satuan	Target 2019	Alokasi 2019 (Rp Ribu)
Terkendalinya penggunaan barang operasi impor dan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas	1	Rekomendasi rencana kebutuhan barang impor pada kegiatan usaha hulu migas	Dokumen	1500	1.044.204,00
	2	Persentase penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) pada kegiatan usaha hulu migas	%	60	
Optimalnya produksi migas	3	Optimalisasi <i>Lifting</i> minyak dan gas bumi (APBN 2019):			1.889.423,00
		a. Minyak bumi	MBOPD	775	
		b. Gas bumi	MBOEPD	1.250	
Optimalnya penerimaan negara sub sector migas	4	Optimalisasi Penerimaan Negara	Rp Triliun	234,73	
	5	Penetapan Formula Harga Minyak Indonesia	Dokumen	12	

	6	a. Pelaksanaan dan koordinasi kerjasama multilateral dan regional migas	Dokumen	3	1.144.156,00
		b. Pelaksanaan dan koordinasi kerjasama bilateral dan dalam negeri migas	Dokumen	7	
	7	Pengawasan implementasi program pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat	Dokumen	2	
Meningkatnya investasi subsektor migas	8	Fasilitasi investasi subsektor migas	Miliar US\$	13,425	1.029.635,00
	9	Pembinaan dan pengawasan kemampuan produk dalam negeri	Perusahaan	200	
Optimalnya perencanaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi	10	Pengembangan infrastruktur gas bumi Nasional			1.206.800,00
		a. Fasilitasi pengembangan infrastruktur gas bumi nasional	Dokumen	1	
		b. Penyusunan rencana induk infrastruktur gas bumi Indonesia	Dokumen	1	
Meningkatnya kualitas perencanaan strategis kemigasan	11	Penyusunan Perencanaan Strategis Ditjen Migas			
		a. Penyusunan Renstra Ditjen Migas 2020 – 2024	Dokumen	1	
		b. Evaluasi Indikator Kinerja Ditjen Migas	Dokumen	1	

IKK DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Tabel 13. IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hilir

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir					9.615.640,00	
Sasaran	No	IKK	Satuan	Target 2019	Alokasi 2019 (Rp Ribu)	
pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan pengangkutan migas	1	Fasilitas penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengangkutan dalam negeri			1.143.607,00	
		a. Minyak bumi, BBM darat dan BBM	KL	11.000		
		b. LPG	Ton	1.500		
		c. CNG	M3	1.250		
	2	Izin usaha pengangkutan migas				
		a. minyak bumi, BBM darat dan BBM	Izin Usaha	40		
		b. LPG	Izin Usaha	10		

Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan niaga migas		c. CNG	Izin Usaha	1	1.427.555,00		
		d. Gas bumi melalui pipa	Izin Usaha	1			
		3	Kebutuhan bahan bakar domestik				
			a. BBM	Juta KL		80,33	
	b. LPG		Juta Ton	6,7			
	c. Gas bumi untuk rumah tangga		MMSCFD	10,4			
	d. BBG dan CNG		MMSCFD	29,6			
	e. Impor BBM		Juta KL	38,33			
	f. Impor LPG	Juta Ton	6,2				
	4	Pemrosesan izin usaha niaga dan rekomendasi ekspor/impur migas sesuai aturan dan SOP yang berlaku	%	100			
		5	Sosialisasi tata niaga migas	Laporan		1	

Terselenggaranya Pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan penyimpanan migas	6	Fasilitas penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur penyimpanan dalam negeri			1.109.371,00	
		a. minyak bumi dan BBM	Ribu KL	20		
		b. LPG	Ribu Ton	10		
		c. LNG	Ribu M3	125		
	d. CNG	Ribu M3	140			
	7	Izin usaha penyimpanan migas				
		a. minyak bumi dan BBM	Izin Usaha	3		
		b. LPG	Izin Usaha	5		
		c. LNG	Izin Usaha	1		
	d. CNG	Izin Usaha	1			
Terselenggaranya Pengawasan dan pembinaan dalam rangka Optimalisasi produksi dan hasil olahan migas	8	Fasilitas penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengolahan migas			2.752.040,00	
		a. Kapasitas terpasang kilang minyak	Ribu Bcd	1.169		
		b. Kapasitas terpasang kilang LPG	MTPA	4,74		

Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan subsidi dan harga bahan bakar	9	c. Kapasitas terpasang kilang LNG	MTPA	44	3.183.067,00	
		Rekomendasi impor pelumas untuk penggunaan sendiri	Sampel	100		
		10	Evaluasi dan verifikasi terhadap pemberian rekomendasi impor pelumas	Laporan		1
	11	Fasilitas penyediaan kapasitas produksi BBM, LPG, dan LNG dalam negeri				
		a. Produksi BBM	Juta KL	42		
		b. Produksi Kilang LPG	Juta Ton	2		
	c. Produksi Kilang LNG	Juta Ton	19			
	12	Volume BBM bersubsidi	Juta KL	15,11		
		13	Volume LPG bersubsidi	Juta MT		6,978

IKK DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Tabel 14. IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hulu

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME)					6.052.819,00
Sasaran	No	IKK	Satuan	Target 2019	Alokasi 2019 (Rp Ribu)
Terselenggaranya kegiatan persiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas konvensional	1	WK migas konvensional			1.336.073,00
		a. Jumlah penawaran WK migas	WK	10	
Terselenggaranya kegiatan persiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas non konvensional	2	WK migas non konvensional			1.012.177,00
		a. Jumlah penawaran WK migas	WK	2	
	3	Pemanfaatan gas bumi domestik:			
		a. Fasilitas Pemanfaatan Alokasi gas Bumi	Dokumen	1	
		b. Penilaian dan Penetapan Harga Gas Bumi	Dokumen	1	

Terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pemantauan kegiatan eksplorasi migas	4	Fasilitas eksplorasi migas			1.214.612,00
		a. Survei Seismik 2D	Km	6.426	
		b. Survei Seismik 3D	Km2	4.548	
		c. Pemboran Eksplorasi	Sumur	82	
		d. Jumlah sumber daya migas konvensional dan nonkonvensional	BBOE	90,16	
		e. Penyerahan data G&G eksplorasi eksploitasi	KKKS	100	

Terselenggaranya kegiatan penilaian kontrak kerja sama dan pengembangan lapangan migas	5	Penilaian pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi			1.244.980,00
		a. Jumlah perpanjangan/alih kelola KKS	Persetujuan	1	
		b. Jumlah Rekomendasi penggunaan wilayah kerja migas untuk kegiatan lainnya	Rekomendasi	2	
		c. Jumlah persetujuan <i>Plan of Development</i> (POD I)	Persetujuan	1	
Terkendalinya penggunaan terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pemantauan optimalisasi pembrodusian cadangan migas dan koordinasi pengelolaan data eksploitasi migas	6	Produksi Minyak dan Gas Bumi			1.244.977,00
		a. Produksi minyak dan gas bumi:			
		• minyak bumi	MBOPD	775	
		• gas bumi	MBOEPD	1.250	
		b. Cadangan minyak dan gas bumi			
		• minyak bumi	MMSTB	5.747	
		• gas bumi	TCF	142	
c. Penyusunan Neraca Gas Bumi Indonesia	Dokumen	1			

IKK DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Tabel 5. IKK Direktorat Teknik dan Lingkungan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas (DMT)					5.636.222,00
Sasaran	No	IKK	Satuan	Target 2019	Alokasi 2019 (Rp Ribu)
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan regulasi keteknikan dan keselamatan migas	1	Pengawasan keteknikan yang baik: Jumlah perusahaan yang telah dibina dan melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	30	1.000.000,00
		a. Jumlah perusahaan yang telah dibina dan melaksanakan keteknikan yang baik			
		b. Monitoring pemanfaatan gas flare oleh perusahaan			
Meningkatnya jumlah perusahaan usaha penunjang migas yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang	3	Pengawasan dan Pembinaan Perusahaan Inspeksi	Perusahaan	15	1.000.000,00
		Jumlah perusahaan pengujian teknis yang dilakukan audit kepatuhan			
	4	Jumlah perusahaan inspeksi teknis yang dilakukan audit kepatuhan	Perusahaan	20	
Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKM) pada kegiatan usaha migas	5	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada kegiatan usaha migas	Perusahaan	10	1.636.222,00
		a. Jumlah badan usaha hilir yang memiliki SMKM dengan rating nilai di atas 80			
		b. Jumlah kontraktor atau badan usaha hulu yang memiliki SMKM dengan rating nilai di atas 80			

Meminimalkan tingkat kecelakaan dan kegagalan operasi kegiatan usaha migas	6	Pengawasan keselamatan kegiatan operasi			1.000.000,00
		a. Jumlah perusahaan hilir migas yang kegiatan operasinya	Perusahaan	225	

		tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>zero Accident</i>)			
		b. Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>zero Accident</i>)	Perusahaan	110	
Tercapainya peningkatan jumlah standar (RSNI-3 dan RSKKNI serta RKKNI) dan peningkatan penerapan SNI, SKKNI, dan KKKNI pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi	7	Perumusan dan penerapan standar			1.000.000,00
		a. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI-3) untuk kegiatan usaha migas	Rancangan	3	
		b. Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI-3) untuk kegiatan usaha migas	Rancangan	3	
	9	c. Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi di kegiatan usaha migas	Perusahaan	35	

IKK SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Tabel 6. IKK Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (SDM)					120.134.461,00
Sasaran	No	IKK	Satuan	Target 2019	Alokasi 2019 (Rp Ribu)
Terselenggaranya manajemen perencanaan dan informasi yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	1	Jumlah dokumen perencanaan (RKAKL dan RKT)	Dokumen	2	120.134.461,00
	2	Jumlah laporan evaluasi kinerja ditjen migas	Laporan	1	
	3	Jumlah pemeliharaan dan pengelolaan website, jaringan dan database serta penyebaran dan pelayanan informasi publik	Paket	1	
Terselenggaranya pengelolaan administrasi perbendaharaan,	4	Penyelesaian pembayaran atas penagihan DIPA ditjen migas	%	100	
barang milik negara, serta akuntansi, dan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan	5	Penyusunan laporan keuangan ditjen migas	%	100	
Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan peraturan hukum, pertimbangan hukum, dan urusan hubungan masyarakat yang profesional dan berbasis pelayanan hukum	6	Jumlah rancangan peraturan perUUan sektor migas	Rancangan	15	111.272.762,00
	7	Jumlah pertimbangan hukum dalam kegiatan usaha migas	Pertimbangan	20	
	8	Jumlah pemberian bantuan hukum dalam kegiatan usaha migas	Bantuan	10	
	9	Jumlah laporan layanan informasi yang diberikan	Laporan	1	
Terselenggaranya pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tatalaksanaan yang efisien dan profesional	10	Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan perlengkapan	Laporan	2	8.118.200,00
	11	Layanan pembinaan pengelolaan pegawai	Laporan	1	
	12	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai	%	100	

IKK DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Tabel 7. IKK Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI)					980.341.118,00
Sasaran	No	IKK	Satuan	Target 2019	Alokasi 2019 (Rp Ribu)
Terbangunnya infrastruktur minyak dan gas bumi	1	Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga			852.480.000,00
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga	Lokasi	18	
	b. Rumah Tangga tersambung gas	SR	78.216		
	2	Jumlah dokumen Reviu FEED dan DEDC Jargas	Lokasi	15	1.583.779,00
	3	Monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas *)	Lokasi	1	
	4	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan			111.272.762,00
Pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana		Paket	13.305		
Terlaksananya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas	5	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani			8.118.200,00
		Pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk petani	Paket	1.000	

*) Fasilitasi kerja sama pembangunan SPBG dengan NEDO

BAB 6

Rencana Aksi

RENCANA AKSI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyampaikan bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenpanRB menerapkan pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP untuk instansi pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan instansi pemerintah dan berdasarkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan KESDM bahwa penyusunan rencana aksi atas kinerja merupakan bagian penilaian SAKIP. Rencana Aksi tersebut akan memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan yang mencantumkan sub kegiatan/ sub komponen rinci dalam upaya mewujudkan target kinerja. Rencana aksi memuat rencana-rencana yang akan dilakukan secara periodik baik bulanan, triwulanan, atau per semester dengan begitu target suatu kinerja dapat terpantau dengan baik

pada saat evaluasi. Isi rencana aksi atas kinerja Direktorat Jenderal Migas lebih lengkap dapat diakses di aplikasi SIMERAK melalui website <http://simerak.migas.esdm.go.id>. Pengguna aplikasi khususnya pengguna eselon III diwajibkan mengisi Rencana Aksi per sub kegiatan/sub komponen setiap bulannya, disertai dengan pengisian jumlah target data dukung yang akan disampaikan pada waktu akan dilakukan penilaian oleh evaluator pada akhir triwulan I, II, III dan IV. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah sebagai alat bantu dalam upaya peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja Ditjen Migas secara lebih baik kualitasnya pelaporannya, proses dokumentasinya dan juga peningkatan akses dan penyajian datanya. Berikut data yang termuat dalam format rencana aksi atas kinerja yaitu:

1. Sasaran Kegiatan
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
3. Target
4. Komponen/Sub Komponen
5. Anggaran
6. Rencana Aksi (Januari-Desember)
7. Evaluasi Setiap Tiga Bulan (Triwulan)

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung Migas

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta 12910

Telepon : 021-5268910

Fax : 021-5205469

Email : info@migas.esdm.go.id

Website : <http://migas.esdm.go.id/>